



Skripsi

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT UPAH,
INFLASI DAN TINGKAT PENDIDIKAN (DI LIMA PROVINSI DENGAN
TINGKAT PENGANGGURAN TERTINGGI) DI INDONESIA 2013-2023**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh:

DESI WINDA SITORUS

NIM. C1A021005

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI**

2025

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Winda Sitorus
NIM : C1A021005
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Upah, Inflasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran (di Lima Provinsi Dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi) di Indonesia 2013-2023

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi ini adalah karya asli penulis, selama proses penulisan tidak melakukan plagiat atas karya ilmiah orang lain, semua petikan yang saya ajukan dalam skripsi ini sesungguhnya ada dan disisipkan dengan kaedah ilmiah penulisan.
2. Bila dikemudian hari didapati ketidak sesuaian sebagaimana pada poin (1), maka saya siap menerima sanksi berupa pencabutan gelar sarjana yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 26 Juni 2025



Desi Winda Sitorus

NIM. C1A021005

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

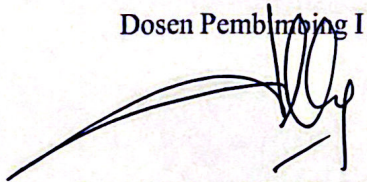
Dengan ini Pembimbing Skripsi dan Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi menyatakan bahwa Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Desi Winda Sitorus
NIM : C1A021005
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Upah, Inflasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran (di Lima Provinsi Dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi) di Indonesia 2013-2023

Telah disetujui dan disahkan sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku dalam Ujian Komprehensif dan Skripsi pada tanggal seperti yang tertera dibawah ini:

Jambi, 26 Juni 2025

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Junaidi, S.E., M.Si.

NIP. 196706021992031003

Dosen Pembimbing II



Dr. Zainul Bahri, S.E., M.E.

NIP. 197504022008121004

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan



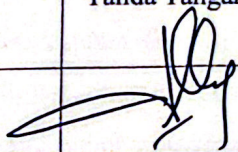
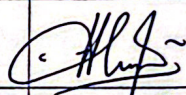
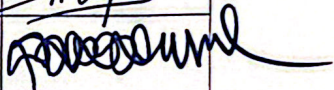
Dr. Hj. Erni Achmad, S.E., M.Si.

NIP. 196801241993032001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Juni 2025
Jam : 10.00 - 12.00 WIB
Tempat : R_1.3 Gedung Baru

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Prof. Dr. Junaidi, S.E., M.Si.	
Anggota Penguji 1	Dra. Hj. Hardiani, M.Si.	
Anggota Penguji 2	Dr. Zainul Bahri, S.E., M.E.	

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Jambi



Prof. Dr. Shofia Amin, S.E., M.Si.

NIP. 196603011990032002

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Dr. Rafiqi, MA

NIP. 197802282005011003

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan, kemampuan, kekuatan, kelancaran, serta petunjuk dalam setiap usaha yang dijalani. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1), dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Upah, Inflasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran (di Lima Provinsi Dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi) di Indonesia 2013-2023”. Selama penyusunan tugas akhir ini, penulis mendapatkan banyak pelajaran baru, dukungan motivasi, serta bantuan bimbingan yang sangat berharga dari banyak pihak yang dimulai dari pelaksanaan sampai penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada orang-orang disekitar penulis yang penulis hormati dan cintai, yang banyak membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses membuat skripsi ini. Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Helmi., S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Jambi.
2. Ibu Prof. Dr. Shofia Amin, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
3. Bapak Dr. Rafiqi, M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
4. Ibu Dr. Hj. Erni Achmad, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
5. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.E., M.Si. dan Bapak Dr. Zainul Bahri, S.E., M.E selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan, masukan dan bimbingan yang sangat berharga selama penulis melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Hj. Hardiani, M.Si. selaku Dosen penguji skripsi yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
7. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan selama penulis kuliah.
8. Desi Winda Sitorus, diri saya sendiri. Terima kasih telah menyelesaikan apa yang telah dimulai, meski jalannya tidak selalu mudah.

9. Keluarga tercinta Bapak Suleman Sitorus, Ibu Nurisma Hutabarat, saudara dan saudari tersayang Royuli Sitorus S.E, Ramli Chandra Sitorus S.T, Apt. Lika Lastri Sitorus S.farm, Sumantri Panjaitan S.T, Mawar Sitorus S.Ak, dan Rehabeam Sitorus, serta keponakan tersayang Arabella Rachel Panjaitan yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan yang amat sangat banyak baik secara materil ataupun moril.
10. Teman-teman seperjuangan masa kuliah Ribka Tiara, Indah Fadila, Zelika Novtalia, Sheilla, Tania, Nathania, Febila, Tasya, Merlyn dan Jelita yang telah memberikan semangat serta dukungannya kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat terbaik penulis Kiran, Manna, Desy, Jesika, Yosafat, Fenuel dan Eunike yang telah menjadi teman berbagi cerita, saling menyemangati, dan memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan R003 atas kebersamaan, kerja sama, dukungan dan canda tawa yang terjalin menjadi bagian berharga dalam perjalanan studi penulis.
13. Seluruh penulis ataupun tokoh-tokoh pemikiran ekonomi yang tulisannya dimuat pada skripsi ini sangatlah membantu dan menginspirasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam Menyusun skripsi, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna hal ini didasari dengan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi di masa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan bisa dijadikan referensi dalam penelitian selanjutannya.

Jambi, 26 Juni 2025
Penulis

Desi Winda Sitorus

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat upah minimum, inflasi, dan pendidikan terhadap tingkat pengangguran di lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan Papua Barat selama periode 2013–2023. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif dengan pendekatan regresi data panel. Berdasarkan hasil uji Chow dan Hausman, model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel tingkat upah minimum dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan pendidikan tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor upah dan inflasi memiliki peran yang lebih besar dalam memengaruhi tingkat pengangguran dibandingkan dengan aspek sosial seperti pendidikan. Selain itu, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Upah, Inflasi, dan Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Di Lima Provinsi.

Kata kunci: pengangguran, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, inflasi, pendidikan, data panel.

Abstract

This study aims to analyze the effect of economic growth, minimum wage, inflation, and education on the unemployment rate in five provinces with the highest unemployment levels in Indonesia, namely DKI Jakarta, Banten, West Java, Riau Islands, and West Papua, during the period 2013–2023. The methods used are descriptive analysis and quantitative analysis with a panel data regression approach. Based on the results of the Chow and Hausman tests, the best model used in this study is the Fixed Effect Model (FEM). The findings show that partially, minimum wage and inflation have a significant effect on unemployment, while economic growth and education do not have a significant effect. These results indicate that wage and inflation factors play a greater role in influencing unemployment compared to social aspects such as education. In addition, the results also show that simultaneously, economic growth, minimum wage, inflation, and education have a significant effect on the unemployment rate in the five provinces.

Keywords : unemployment, economic growth, minimum wage, inflation, education, panel data.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
Abstrak.....	vi
Abstract.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan	5
1.4 Manfaat	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Pengangguran.....	7
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	8
2.1.3 Tingkat Upah.....	9
2.1.4 Inflasi	10
2.1.5 Tingkat Pendidikan	11
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	12
2.2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran	12
2.2.2 Hubungan Tingkat Upah Terhadap Pengangguran	13
2.2.3 Hubungan Inflasi Terhadap Pengangguran	15
2.2.4 Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran	16
2.3 Penelitian Terdahulu	17

2.4	Kerangka Berpikir.....	21
2.5	Hipotesis Penelitian	23
BAB III METODE PENELITIAN		24
3.1	Jenis Data dan Sumber Data	24
3.1.1	Jenis Data	24
3.1.2	Sumber Data.....	24
3.2	Metodologi Pengumpulan Data	24
3.3	Metode dan Analisis Data	25
3.3.1	Analisis Perkembangan.....	25
3.3.2	Analisis Pengaruh	26
3.4	Pendekatan Perhitungan Model Regresi Data Panel.....	27
3.4.1	Pendekatan Pooled Least Square (PLS) / Common Effect Model (CEM)	27
3.4.2	Pendekatan Fixed Effect Model (FEM)	28
3.4.3	Pendekatan Random Effect Model (REM)	28
3.5	Pengujian Model Regresi Data Panel	29
3.5.1	Uji Chow	29
3.5.2	Uji Hausman	30
3.5.3	Uji Lagrange Multiplier (LM)	31
3.6	Pengujian Asumsi Klasik	31
3.6.1	Uji Normalitas.....	32
3.6.2	Uji Multikolinieritas.....	33
3.6.3	Uji Heteroskedastisitas.....	34
3.7	Pengujian Hipotesis	34
3.7.1	Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	35
3.7.2	Uji Signifikansi Parsial (Uji t)	35
3.7.3	Koefisien Determinasi (Adjusted R ²)	36
3.8	Operasional Variabel	36
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN		37
4.1	Kondisi Geografis Lima Provinsi	37
4.2	Kondisi Penduduk di Lima Provinsi	41

4.3	Kondisi Tingkat Pengangguran di Lima Provinsi.....	42
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		52
5.1	Perkembangan Variabel Penelitian	52
5.1.1	Perkembangan Tingkat Pengangguran.....	52
5.1.2	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi.....	54
5.1.3	Perkembangan Tingkat Upah.....	56
5.1.4	Perkembangan Inflasi.....	58
5.1.5	Perkembangan Tingkat Pendidikan.....	60
5.2	Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Upah, Inflasi, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran di Lima Provinsi	62
5.2.1	Regresi Data Panel.....	62
5.2.2	Pemilihan Model.....	63
5.2.2.1	Hasil Uji Chow	63
5.2.2.2	Hasil Uji Hausman.....	64
5.2.3	Estimasi Model Fixed Effect Model	64
5.2.4	Uji Asumsi Klasik.....	65
5.2.4.1	Uji Normalitas.....	66
5.2.4.2	Uji Multikolinearitas.....	66
5.2.4.3	Uji Heteroskedastisitas.....	67
5.2.5	Hasil Uji Hipotesis	68
5.2.5.1	Hasil Uji F.....	68
5.2.5.2	Hasil Uji t.....	69
5.2.5.3	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	70
5.3	Analisis Ekonomi.....	71
5.3.1	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran.....	71
5.3.2	Pengaruh Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran.....	72
5.3.3	Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran	73
5.3.4	Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran	74
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN		79
6.1	Kesimpulan	79

6.2	Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....		81
LAMPIRAN.....		84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tingkat Pengangguran di 5 Provinsi di Indonesia 2019-2023	2
Tabel 4.2	Kondisi Penduduk di Lima Provinsi Tahun 2013–2023	41
Tabel 4.3	Tingkat Pengangguran di Lima Provinsi tahun 2013-2023	42
Tabel 4.4	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Lima Provinsi 2013-2023	44
Tabel 4.5	Tingkat Upah (UMP) di Lima Provinsi	46
Tabel 4.6	Inflasi di Lima Provinsi 2013-2023	48
Tabel 4.7	Tingkat Pendidikan di Lima Provinsi 2013-2023	50
Tabel 5.1.1	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Lima Provinsi Tahun 2013-2023 (%)	54
Tabel 5.1.2	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Di Lima Provinsi Tahun 2013-2023 (%)	55
Tabel 5.1.3	Perkembangan Upah Minimum Provinsi Tahun 2013–2023 (%) .	57
Tabel 5.1.4	Perkembangan Tingkat Inflasi di Lima Provinsi Tahun 2013- 2023 (%)	59
Tabel 5.1.5	Perkembangan Tingkat Pendidikan (RLS) Lima Provinsi Tahun 2013–2023 (%)	61
Tabel 5.2.2.1	Hasil Uji Chow	63
Tabel 5.2.2.2	Hasil Uji Hausman	64
Tabel 5.2.3	Estimasi Model Fixed Effect Model	65
Tabel 5.2.4.1	Hasil Uji Normalitas	66
Tabel 5.2.4.2	Hasil Uji Multikolinearitas	67
Tabel 5.2.4.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	67
Tabel 5.2.5.1	Hasil Uji F	68
Tabel 5.2.5.2	Hasil Uji t	69
Tabel 5.2.5.3	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	22
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangguran merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia sebagai anggota ASEAN dan G20. Meskipun Indonesia terus berupaya mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, masalah dalam penyerapan tenaga kerja masih menjadi hambatan dalam pertumbuhan ekonomi (Dian, 2023).

Berdasarkan laporan World Economic Outlook dari IMF pada April 2024, tingkat pengangguran di Indonesia tercatat sebesar 5,2%, yang merupakan angka tertinggi di antara lima negara ASEAN yang dibandingkan. Data statistik menunjukkan bahwa pada Februari 2024 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai sekitar 7,4 juta orang. Meskipun jumlah tersebut mengalami penurunan sekitar 790 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya, pengangguran tetap menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan ekonomi nasional.

Setiap negara tentu mengharapkan tingkat pengangguran yang rendah. Namun pada kenyataannya, pengangguran tetap terjadi meskipun kondisi perekonomian sedang stabil. Jika tidak segera ditangani, pengangguran dapat memicu permasalahan sosial, termasuk meningkatnya angka kemiskinan. (Buswari et al., 2023).

Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran adalah tingginya standar pendidikan yang dipersyaratkan oleh dunia kerja. Banyak perusahaan menuntut calon pekerja memiliki setidaknya ijazah sarjana, yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran terutama di kalangan lulusan sekolah menengah. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu segera merumuskan kebijakan strategis dan sistematis dalam mengatasi pengangguran. Menurut (Mankiw, 2000), seseorang dikategorikan menganggur apabila ia tidak bekerja, sedang aktif mencari pekerjaan, atau sedang menunggu untuk memulai pekerjaan baru.

Tabel 1. 1 Tingkat Pengangguran di 5 Provinsi di Indonesia 2019-2023

Provinsi	Tahun (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Banten	8,11	10,64	8,98	8,09	7,52
Kep.Riau	7,5	10,34	9,91	8,23	6,8
Jawa Barat	8,04	10,46	9,82	8,31	7,44
DKI Jakarta	6,54	10,95	8,5	7,18	6,53
Papua Barat	6,43	6,8	5,84	5,37	5,53

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2023 (Data Diolah)

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lima provinsi, yaitu Banten, Kepulauan Riau, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Papua Barat, secara konsisten mencatat tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lain. Rata-rata tingkat pengangguran terbuka nasional pada tahun 2023 tercatat sebesar 5,45%, sedangkan di kelima provinsi penelitian ini, rata-ratanya mencapai 6,46%. Artinya, tingkat pengangguran di daerah industri ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional.

Pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat mengurangi tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja baru. Menurut (Amrullah et al., 2019), peningkatan Produk Domestik Bruto (PDRB) menandakan peningkatan produksi barang dan jasa, yang pada akhirnya meningkatkan permintaan tenaga kerja.

Kelima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan Papua Barat, merupakan pusat industri yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. DKI Jakarta sebagai ibu kota negara berfungsi sebagai pusat bisnis dan jasa, Banten dan Jawa Barat dikenal dengan kawasan industri manufakturnya, Kepulauan Riau menonjol di sektor industri galangan kapal dan pariwisata, sementara Papua Barat memiliki sektor industri ekstraktif yang kuat.

Dengan industri yang beragam tersebut seharusnya mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di kelima provinsi ini tetap tinggi dalam satu dekade terakhir, bahkan lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah yang bukan merupakan pusat industri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), pertumbuhan ekonomi di kelima provinsi tersebut pada periode 2013–2023 menunjukkan tren yang umumnya positif. DKI Jakarta mengalami kenaikan dari Rp1.836.000 miliar pada 2019 menjadi Rp2.050.000 miliar pada 2023, yang berada jauh di atas rata-rata PDRB provinsi nasional sebesar Rp627.000 miliar pada tahun 2023. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, hal ini belum berhasil menurunkan tingkat pengangguran secara signifikan. Seharusnya, Pertumbuhan ekonomi dapat berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja baru. Menurut (Amrullah et al., 2019), peningkatan Produk Domestik Bruto (PDRB) menandakan peningkatan produksi barang dan jasa, yang pada akhirnya meningkatkan permintaan tenaga kerja.

Tingkat upah minimum juga mengalami peningkatan di lima provinsi tersebut selama periode yang sama. Secara nasional, rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) Indonesia 2023 mencapai Rp 2.923.309 (Kemnaker, 2024). DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan upah minimum tertinggi, yaitu Rp4.901.798, diikuti oleh Papua Barat dengan Rp3.553.262, Kepulauan Riau Rp3.378.468, Banten Rp3.245.111, dan Jawa Barat Rp3.097.679. Kenaikan upah minimum secara teori, seharusnya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong partisipasi dalam dunia kerja (Aruan & Sriyono, 2016). Namun, meskipun upah minimum telah meningkat signifikan, fenomena ini tidak selalu diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran. Menurut Prawira (2018), kenaikan upah minimum yang terlalu tinggi juga dapat berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja karena meningkatkan beban biaya operasional perusahaan.

Selain faktor upah, tingkat inflasi juga memengaruhi pengangguran. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa inflasi di lima provinsi cenderung menurun selama periode 2013–2023. Rata-rata inflasi nasional Indonesia selama periode tersebut tercatat sekitar 3,1% per tahun. DKI Jakarta dan Banten mencatatkan inflasi yang lebih rendah dari rata-rata nasional, sementara Papua Barat dan Kepulauan Riau mengalami inflasi yang lebih tinggi pada beberapa tahun, terutama pasca-pandemi. Meskipun, inflasi secara umum menurun di seluruh provinsi tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan tingkat pengangguran, yang bertentangan dengan teori

ekonomi konvensional yang menyatakan bahwa inflasi yang menurun akan diikuti dengan turunnya tingkat pengangguran (Fahrudin & Sumitra, 2020).

Tingkat pendidikan di lima provinsi tersebut juga mengalami peningkatan selama periode 2013-2023, yang diukur dari rata-rata lama sekolah. Secara umum, peningkatan rata-rata lama sekolah menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas sumber daya manusia (Maulidah & Soejoto, 2017). Rata-rata lama sekolah nasional Indonesia pada tahun 2023 mencapai 8,5 tahun, sedangkan DKI Jakarta memiliki rata-rata yang lebih tinggi, di atas 12 tahun. Tingkat pendidikan di lima provinsi tersebut juga mengalami peningkatan, Namun, tingginya tingkat pendidikan tidak selalu diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran, yang bertentangan dengan asumsi dasar bahwa pendidikan yang lebih tinggi akan memperkecil risiko pengangguran. Mengindikasikan adanya faktor lain yang turut memengaruhi pasar tenaga kerja, seperti ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda terkait pengaruh faktor-faktor ekonomi terhadap tingkat pengangguran. (Pamungkas et al., 2024) menemukan bahwa inflasi dan upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran, sedangkan Pramastuti dan (Anggita, 2017) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif tidak signifikan dan UMK memiliki pengaruh negatif signifikan. Di sisi lain, Herniwati dan (Handayani, 2019) menemukan bahwa pendidikan dan upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran. (Septiyanto dan Tusianti, 2020) bahkan menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi pengangguran di Indonesia bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak variabel.

Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan serapan tenaga kerja. Meskipun provinsi-provinsi tersebut menunjukkan indikator ekonomi yang positif, seperti pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat dengan PDRB yang terus meningkat, tingkat upah minimum yang naik secara signifikan, tingkat pendidikan yang semakin membaik yang dilihat dari peningkatan rata-rata

lama sekolah, serta tingkat inflasi yang cenderung terkendali, namun tingkat pengangguran di lima provinsi ini masih tergolong tinggi daripada provinsi lainnya di Indonesia. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kondisi ekonomi makro dengan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian ini dengan judul **"Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Upah, Inflasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran (di Lima Provinsi Dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi) di Indonesia 2013-2023."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi, tingkat upah, inflasi, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia selama periode 2013-2023?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat upah, inflasi, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia selama periode 2013-2023?

1.3 Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan guna mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Menganalisis perkembangan tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, tingkat upah, inflasi, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia selama periode 2013-2023.
2. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat upah, inflasi, dan tingkat Pendidikan terhadap tingkat pengangguran di lima provinsi dengan tingkat tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia selama periode 2013-2023?

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini bisa dijabarkan di bawah ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam memperdalam pemahaman mengenai faktor-faktor yang memberi pengaruh pengangguran di Indonesia. Dengan menyediakan data aktual terbaru, penelitian ini mengkaji hubungan antara pertumbuhan ekonomi, tingkat upah, inflasi, tingkat pendidikan, serta pengangguran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang dinamika pengangguran di Indonesia, serta memberikan dasar bagi pengambilan kebijakan yang tepat sasaran dalam mengatasi masalah pengangguran.

1.4.2 Manfaat Praktis

A. Bagi Pemerintah:

Temuan penelitian ini bisa dipergunakan untuk menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang strategis guna mengurangi pengangguran di provinsi-provinsi dengan tingkat pengangguran tinggi.

B. Bagi Akademisi:

Penelitian ini bisa digunakan menjadi acuan bagi penelitian berikutnya yang berhubungan dengan pengangguran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Indonesia.

C. Bagi Masyarakat:

Memberikan wawasan yang lebih baik mengenai dinamika pengangguran serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan demikian mampu meningkatkan kesadaran dalam pengembangan keterampilan dan pendidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengangguran

Pengangguran merupakan kondisi di mana seseorang dalam usia kerja tidak memiliki pekerjaan, namun sedang aktif mencari pekerjaan atau sedang menunggu hasil dari proses rekrutmen. Menurut (Mankiw, 2013), pengangguran menjadi masalah serius karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi maupun psikologis.

Secara teori, ada beberapa pendekatan dalam menjelaskan penyebab pengangguran. Teori Keynesian, yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes, menyebutkan bahwa pengangguran terjadi karena permintaan agregat yang rendah. Ketika permintaan terhadap barang dan jasa menurun, produksi ikut turun, dan perusahaan terpaksa mengurangi jumlah pekerja (Sukirno, 2010).

Sebaliknya, teori Klasik berpendapat bahwa pasar tenaga kerja akan menyesuaikan diri secara alami melalui mekanisme harga. Menurut pandangan ini, pengangguran dianggap sebagai fenomena sementara yang akan hilang seiring waktu melalui fleksibilitas upah (Gilarso, 2004). Apabila terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja (pengangguran), maka upah akan turun hingga tercapai keseimbangan kembali antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dengan demikian, campur tangan pemerintah dianggap tidak diperlukan karena pasar diyakini mampu mencapai titik keseimbangannya sendiri.

Arthur Okun juga menjelaskan hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi melalui konsep yang dikenal sebagai Hukum Okun. Ia menyatakan bahwa setiap penurunan 2% dalam output riil dari potensinya akan meningkatkan pengangguran sekitar 1% (Okun, 1962).

Pengangguran di negara berkembang seperti Indonesia juga disebabkan oleh pertumbuhan tenaga kerja yang lebih cepat daripada penciptaan lapangan kerja baru. Ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri juga turut memperparah masalah ini (Indayani & Hartono, 2020).

Menurut (Tamala, 2024), pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Pengangguran terbuka, individu tidak memiliki pekerjaan sama sekali.
2. Setengah pengangguran, bekerja kurang dari jam kerja normal.
3. Pengangguran terselubung, memiliki pekerjaan, tetapi tidak sesuai dengan potensi atau keterampilan.

Dengan memahami jenis dan penyebab pengangguran, diharapkan pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam menurunkan tingkat pengangguran secara berkelanjutan.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas suatu wilayah atau negara dalam memproduksi barang dan jasa dari waktu ke waktu. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut (Samuelson dan Nordhaus, 2001), pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemampuan jangka panjang suatu perekonomian untuk terus meningkatkan produksinya.

(Mankiw, 2013) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan produktivitas tenaga kerja. Ketika produktivitas meningkat, output yang dihasilkan juga bertambah, sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, penting juga untuk memperhatikan pemerataan hasil pertumbuhan agar manfaatnya dirasakan secara adil.

Secara teori, pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif dengan tingkat pengangguran. Artinya, ketika ekonomi tumbuh, seharusnya ada lebih banyak lapangan kerja yang tersedia. Hal ini ditegaskan oleh Sukirno (Aisyaturridho, 2021) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak, sehingga pengangguran bisa ditekan.

Kondisi ini juga dijelaskan oleh (Ishak, 2018), bahwa ketika aktivitas produksi meningkat, maka kebutuhan akan tenaga kerja ikut naik. Perusahaan akan merekrut lebih banyak pekerja untuk memenuhi permintaan pasar. Maka dari itu, pertumbuhan ekonomi yang sehat biasanya sejalan dengan penurunan angka pengangguran.

Selain itu, menurut (Naibaho dan Nabila, 2021), PDRB tidak hanya menunjukkan total output suatu daerah, tetapi juga mencerminkan seberapa besar potensi daerah tersebut dalam mengelola sumber dayanya. Oleh karena itu, peningkatan PDRB sering dijadikan tolak ukur utama untuk menilai kinerja ekonomi suatu wilayah.

Dalam analisis, PDRB bisa dihitung berdasarkan harga berlaku atau harga konstan. PDRB harga berlaku digunakan untuk melihat struktur dan kontribusi sektor ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara riil tanpa terpengaruh oleh inflasi (Putri & Muljaningsih, 2023).

2.1.3 Tingkat Upah

Upah merupakan imbalan yang diterima pekerja atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha sesuai dengan perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, upah minimum menjadi salah satu isu penting dalam hubungan industrial. Penetapan upah minimum dimaksudkan untuk menjamin perlindungan terhadap pekerja agar mereka memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Dengan demikian, kebijakan upah minimum tidak hanya berfungsi sebagai standar pembayaran, tetapi juga sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial.

Namun, pandangan tentang upah tidak selalu sama antara pengusaha dan pekerja. Bagi pengusaha, upah adalah bagian dari biaya produksi, sehingga kenaikan upah dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan. Di sisi lain, pekerja mengandalkan upah sebagai sumber utama penghidupan, sehingga mereka berharap adanya peningkatan yang sebanding dengan beban kerja dan inflasi.

Teori Arthur Lewis menyebutkan bahwa negara dengan jumlah penduduk besar sering mengalami kelebihan tenaga kerja, terutama pada sektor informal. Dalam situasi seperti ini, daya tawar pekerja menjadi lemah, sehingga cenderung menerima upah rendah. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menetapkan upah minimum menjadi penting agar pekerja tidak semakin terpinggirkan (Supratikno, 2011).

Meskipun kebijakan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, dalam beberapa kasus justru dapat memicu efek sebaliknya. (Sen et al., 2011) menemukan bahwa di Kanada, kenaikan upah minimum malah meningkatkan angka kemiskinan karena banyak perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja. Hal ini bisa terjadi jika kenaikan upah tidak sebanding dengan peningkatan produktivitas.

Di Indonesia, (Adam, 2017) mencatat bahwa kenaikan upah minimum sering kali melebihi kenaikan produktivitas. Hal ini dapat membebani perusahaan, terutama yang bergerak di sektor padat karya, dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Maka dari itu, penyesuaian upah sebaiknya mempertimbangkan kondisi ekonomi, kemampuan perusahaan, dan daya beli masyarakat secara seimbang.

2.1.4 Inflasi

Inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun karena jumlah uang yang sama tidak lagi bisa membeli barang sebanyak sebelumnya. Menurut Samuelson dalam (Reserve & Louis, 2001), inflasi menggambarkan situasi menurunnya nilai riil uang akibat kenaikan harga secara menyeluruh.

Ackley dalam (Erickson, 2000) juga menjelaskan bahwa inflasi bukan hanya kenaikan harga satu atau dua barang saja, melainkan kenaikan yang terjadi secara terus-menerus dan merata di hampir semua sektor ekonomi. Oleh karena itu, inflasi dianggap sebagai salah satu indikator penting dalam menilai kestabilan ekonomi suatu negara.

Sejak krisis ekonomi 1998, pemerintah Indonesia menaruh perhatian besar pada pengendalian inflasi. Hal ini karena inflasi yang tidak terkendali dapat berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan dan memperburuk ketimpangan ekonomi. Jika harga barang pokok terus naik, masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi kelompok yang paling terdampak.

Tingkat inflasi juga memengaruhi dunia usaha. Dalam kondisi inflasi rendah, produsen masih dapat menikmati keuntungan karena kenaikan harga tidak terlalu tinggi. Tapi ketika inflasi melonjak, biaya produksi ikut naik, dan ini bisa membuat perusahaan mengurangi jumlah karyawan untuk menghemat biaya operasional (Hasibuan, 2023).

(Pokhrel, 2024) membagi inflasi berdasarkan tingkat keparahannya sebagai berikut:

1. Inflasi ringan (di bawah 10%), Masih bisa dikendalikan dan tidak terlalu mengganggu ekonomi.
2. Inflasi sedang (10%-30%), Mulai berdampak pada daya beli masyarakat.
3. Inflasi berat (30% ke atas), berpotensi menimbulkan krisis ekonomi dan sosial.

Salah satu penyebab utama inflasi adalah kenaikan biaya produksi, misalnya harga bahan baku yang naik akibat kelangkaan pasokan. Hal ini bisa membuat perusahaan mengurangi aktivitas produksi, yang akhirnya mengurangi kebutuhan tenaga kerja. (Phillips, 2000) menjelaskan bahwa ada hubungan antara inflasi dan pengangguran, yang dikenal dengan Kurva Phillips. Teori ini menunjukkan bahwa saat inflasi tinggi, pengangguran cenderung rendah, dan sebaliknya, meskipun kenyataannya bisa berbeda tergantung kondisi ekonomi suatu negara.

2.1.5 Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Melalui pendidikan, seseorang dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan daya saing di dunia kerja. Menurut (Tjiabrata et al., 2021), pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, budi pekerti, dan kemampuan sosial individu.

(Maulidah dan Soejoto, 2017) menyatakan bahwa tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan menunjukkan adanya keyakinan bahwa pendidikan yang lebih tinggi akan membawa manfaat, baik dari segi pendapatan maupun status sosial. Dengan kata lain, pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas hidup.

Dalam konteks ketenagakerjaan, pendidikan berperan besar dalam menurunkan tingkat pengangguran. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, biasanya semakin besar peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. (Suhendra dan Wicaksono, 2020) menjelaskan bahwa tingkat pendidikan berbanding lurus dengan produktivitas kerja. Orang yang memiliki pendidikan tinggi umumnya lebih siap menghadapi persaingan kerja karena memiliki keahlian dan pengetahuan yang lebih baik.

(Sang, 2017) juga menyebut pendidikan sebagai bentuk investasi sumber daya manusia. Hasil dari investasi ini tidak langsung terlihat, tetapi dalam jangka panjang akan berdampak pada kesejahteraan individu dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini karena pendidikan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan membuka lebih banyak peluang kerja, terutama di sektor formal.

Namun, dalam kenyataannya, tidak semua lulusan pendidikan tinggi langsung mendapatkan pekerjaan. Salah satu penyebabnya adalah ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, sistem pendidikan perlu terus disesuaikan agar bisa menghasilkan lulusan yang relevan dengan perkembangan dunia kerja.

Selain itu, pendidikan juga berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial. Pemerintah terus mendorong peningkatan akses dan kualitas pendidikan, termasuk melalui alokasi anggaran pendidikan yang cukup besar setiap tahunnya (Maulidya, 2021). Diharapkan, dengan pendidikan yang merata, masyarakat di berbagai daerah bisa memperoleh kesempatan yang sama dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran dijelaskan melalui konsep yang dikenal sebagai Hukum Okun (Okun's Law), yang dikemukakan oleh ekonom Arthur Okun. Teori ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara kedua variabel tersebut. (Maryati et al., 2021) mengutip pandangan Mankiw yang menjelaskan bahwa menurut Hukum Okun, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 2 persen akan mendorong peningkatan kesempatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 1 persen.

Hukum Okun menggambarkan hubungan empiris antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran, di mana apabila produk domestik bruto (PDB) tumbuh lebih cepat daripada tingkat potensialnya, maka tingkat pengangguran cenderung mengalami penurunan, dan sebaliknya. Formulasi sederhana dari Hukum Okun dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Unemployment Rate} = -\beta \times (\text{Actual GDP Growth} - \text{Potential GDP Growth})$$

Di sini, β (beta) merupakan koefisien Okun yang bernilai antara 2 dan 3, yang menunjukkan bahwa setiap 1% pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan potensial dapat mengurangi pengangguran sekitar 2 hingga 3%.

Teori Keynesian menegaskan bahwa rendahnya permintaan agregat merupakan faktor utama penyebab terjadinya pengangguran dalam perekonomian. Dalam pandangan John Maynard Keynes, penurunan permintaan agregat akan menyebabkan berkurangnya produksi barang dan jasa, yang selanjutnya mengakibatkan penyusutan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui peningkatan permintaan agregat dipandang sebagai kunci dalam menekan tingkat pengangguran. Sebagai solusi, pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan fiskal ekspansif melalui peningkatan belanja negara serta penurunan tarif pajak untuk mendorong permintaan agregat dan menurunkan tingkat pengangguran.

Pada lima provinsi yang menjadi fokus penelitian ini, meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi selama periode 2013–2023, tingkat pengangguran masih tetap tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidakmerataan distribusi pertumbuhan ekonomi antar sektor, atau bahkan dominasi sektor-sektor tertentu yang tidak menciptakan banyak lapangan kerja baru. Sebagai contoh, sektor-sektor yang membutuhkan modal besar tapi sedikit menyerap tenaga kerja cenderung tidak memberikan dampak signifikan terhadap penurunan pengangguran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara pertumbuhan ekonomi di wilayah terhadap tingkat pengangguran.

2.2.2 Hubungan Tingkat Upah Terhadap Pengangguran

Salah satu penyebab pengangguran adalah kekakuan upah (wage rigidity), yaitu kondisi di mana upah tidak dapat menyesuaikan dengan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Ketika upah riil lebih tinggi dari tingkat keseimbangan,

jumlah tenaga kerja yang tersedia akan melebihi jumlah yang dibutuhkan. Hal ini menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja dan meningkatkan pengangguran. Salah satu contoh kekakuan upah adalah kebijakan upah minimum, di mana pemerintah menetapkan batas bawah upah yang harus dibayar oleh perusahaan kepada karyawan. Kebijakan ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan jika upah minimum ditentukan di luar titik keseimbangan pasar tenaga kerja (Mankiw, 2012).

Kebijakan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah sering dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun, kenaikan upah minimum juga dapat memberikan dampak negatif untuk pasar tenaga kerja, terutama jika peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan produktivitas pekerja. Dalam situasi di mana perusahaan kesulitan menyesuaikan biaya produksi akibat kenaikan upah, langkah yang kerap diambil adalah pengurangan jumlah pekerja. Hal ini berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran.

Menurut Kaufman dan Hotchkiss dalam (Prawira et al., 2018), terdapat hubungan antara upah minimum dan tingkat pengangguran. Peningkatan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah cenderung mengurangi jumlah tenaga kerja yang terserap. Semakin tinggi upah minimum, semakin besar kemungkinan jumlah pekerja yang bekerja akan berkurang di suatu negara.

Memahami hubungan ini sangat penting, karena ada anggapan bahwa kenaikan upah minimum bisa mendorong pengusaha untuk mengurangi jumlah pekerja, terutama di sektor dengan keuntungan yang rendah. Biaya tambahan akibat upah yang lebih tinggi bisa membebani pengusaha, sehingga mereka mungkin akan merumahkan pekerja, menghentikan perekrutan baru, atau bahkan menutup usahanya. Meskipun tujuan utama kenaikan upah minimum adalah meningkatkan kesejahteraan pekerja, dampaknya terhadap pengangguran tetap menjadi masalah yang perlu diperhatikan.

Namun, perlu dicatat bahwa hubungan antara upah minimum dan pengangguran tidak selalu bersifat linear atau sederhana. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor lain, seperti tingkat produktivitas tenaga kerja, struktur industri, dan kebijakan pendukung lainnya, juga memengaruhi dampak dari kebijakan upah minimum. Selain itu, ada pandangan yang menyebutkan bahwa upah

minimum yang layak dapat membantu mengurangi ketegangan sosial, meningkatkan daya beli masyarakat, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Penelitian ini akan menganalisis dampak kenaikan upah minimum terhadap tingkat pengangguran di lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi. Tujuan utamanya adalah untuk memahami apakah kenaikan upah minimum dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan tanpa mengurangi kesempatan kerja, atau justru menyebabkan peningkatan pengangguran karena perusahaan tidak mampu menanggung biaya tambahan. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana respons perusahaan terhadap kebijakan upah minimum, termasuk langkah-langkah seperti peningkatan produktivitas atau penyesuaian tenaga kerja untuk menghadapi perubahan tersebut.

2.2.3 Hubungan Inflasi Terhadap Pengangguran

Menurut Sukirno dalam penelitian (Qomariyah, 2013), inflasi adalah proses kenaikan harga yang berlangsung terus-menerus dalam suatu perekonomian. Secara umum, inflasi menggambarkan peningkatan harga barang dan jasa secara berkelanjutan. Sementara itu, tingkat inflasi merujuk pada persentase kenaikan harga barang dan jasa dalam periode tertentu.

Pengaruh tingkat inflasi terhadap tingkat pengangguran tidak senantiasa bersifat negatif. Inflasi ringan, yaitu yang berada di bawah 10 persen, dapat mendorong pengusaha untuk meningkatkan produksi dan memperluas usaha, karena kenaikan harga akan meningkatkan keuntungan. Hal ini dapat berpotensi menciptakan lapangan kerja baru. Namun, inflasi yang terlalu tinggi dalam jangka panjang justru dapat memberikan dampak negatif. Harga barang produksi dalam negeri akan semakin mahal dibandingkan dengan barang-barang impor, yang pada gilirannya dapat melemahkan daya saing produk domestik (Hartati, 2020).

Melihat kondisi Indonesia, khususnya di lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi yang menjadi fokus penelitian ini, dinamika inflasi menunjukkan pola yang berfluktuasi sepanjang periode 2013–2023. Inflasi sempat mencapai puncaknya pada tahun 2013, lalu menurun saat pandemi COVID-19 akibat turunnya permintaan agregat. Setelah pandemi, inflasi kembali meningkat, yang

kemungkinan memperlambat pemulihan ekonomi dan menghambat upaya penurunan tingkat pengangguran.

Selama masa krisis, turunnya inflasi dapat menyebabkan peningkatan pengangguran karena daya beli masyarakat yang melemah dan penurunan aktivitas ekonomi. Sebaliknya, kenaikan inflasi setelah pandemi dapat mengurangi lapangan kerja, terutama jika perusahaan menghadapi kenaikan biaya produksi dan memutuskan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja demi menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi yang lebih sulit.

2.2.4 Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran

Menurut Elfindri dalam penelitian (Julianto et al, 2019), terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran, di mana pendidikan berperan dalam menentukan status pekerjaan seseorang. Individu dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan membantu menurunkan tingkat pengangguran. Selain itu, mereka yang berpendidikan tinggi umumnya memiliki risiko pengangguran yang lebih rendah dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah, serta berpeluang memperoleh upah yang lebih tinggi, bahkan melebihi atau setara dengan upah minimum.

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan merujuk pada tingkat pendidikan terakhir yang berhasil diselesaikan oleh seseorang, yang biasanya dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah. Di Indonesia, jenjang pendidikan dapat dibagi dalam kategori-kategori berikut:

1. SD : Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau sederajat.
2. SMP : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP Kejuruan, atau sederajat.
3. SMA : Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah, atau sederajat.
4. PT : Pendidikan Tinggi, termasuk Diploma I, II, III, IV, atau sederajat.

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena menjadi dasar utama untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sebagai kebutuhan dasar bagi setiap individu, pendidikan

bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pendidikan, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, dan pendidikan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah. Selain meningkatkan produktivitas, pendidikan juga mempengaruhi tingkat kelahiran (fertilitas) masyarakat. Dengan pendidikan, SDM menjadi lebih siap menghadapi perubahan dan mendukung pembangunan nasional (Iswahyudi et al, 2018).

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Pemilihan penelitian yang relevan didasarkan atas kesamaan variabel dependen maupun independen, metode analisis data serta hasil penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dan referensi dalam penelitian ini. Adapun penelitiannya antara lain:

(Tamala1 et al., 2023) melakukan penelitian berjudul "Analisis Pengaruh PDRB, Tenaga Kerja, UMP, dan IPM terhadap Pengangguran di 6 Provinsi Pulau Jawa Tahun 2010–2019". Penelitian ini menggunakan PDRB, jumlah tenaga kerja, upah minimum provinsi, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi variabel independen, serta tingkat pengangguran terbuka yang menjadi variabel dependen. Temuan penelitian memperlihatkan bahwasanya secara parsial, PDRB memiliki pengaruh negatif serta signifikan terhadap pengangguran, sedangkan tenaga kerja dan upah minimum tidak memiliki pengaruh signifikan. Sebaliknya, IPM menunjukkan pengaruh positif serta signifikan. Secara simultan, seluruh variabel independen punya pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran.

(Novella & Muljaningsih, 2023) meneliti "Analisis Pengaruh Inflasi, Upah Minimum, dan Angka Harapan Hidup terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten". Penelitian ini menggunakan inflasi, upah minimum, serta angka harapan hidup yang menjadi variabel independen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka yang menjadi variabel dependen. Temuan penelitian memperlihatkan bahwasanya inflasi, upah minimum, serta angka harapan hidup secara simultan punya pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Rendahnya tingkat pendidikan di wilayah tersebut turut menjadi faktor tingginya pengangguran, terutama pada lulusan SMA/SMK.

(Tamala et al., 2023) dalam penelitian berjudul "Analisis Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019–2023", menggunakan inflasi yang menjadi variabel independen serta tingkat pengangguran terbuka yang menjadi variabel dependen. Penelitian ini menemukan bahwasanya inflasi punya pengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran, yang mana tiap kenaikan inflasi sejumlah 1% meningkatkan tingkat pengangguran sejumlah 0,163%.

(Faizah & Woyanti, 2023) melakukan penelitian berjudul "Analisis Pengaruh Pendidikan, Partisipasi Kerja, dan Upah Minimum terhadap Pengangguran di Provinsi Banten Tahun 2011–2020". Variabel independen yang dipergunakan di penelitian ini adalah tingkat pendidikan, partisipasi kerja, serta upah minimum, sementara variabel dependennya adalah tingkat pengangguran terbuka. Hasil analisis memperlihatkan bahwasanya pendidikan memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pengangguran. Partisipasi kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, sedangkan upah minimum berpengaruh negatif serta signifikan. Secara simultan, ketiga variabel independen punya pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

(Egeten et al., 2023) meneliti "Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Jumlah Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota-Kota Provinsi Sulawesi Utara". Penelitian ini menggunakan tingkat pendidikan serta jumlah angkatan kerja yang menjadi variabel independen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka yang menjadi variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh negatif serta signifikan terhadap tingkat pengangguran, sementara jumlah angkatan kerja mempunyai pengaruh positif serta signifikan. Secara simultan, kedua variabel independen punya pengaruh signifikan atas tingkat pengangguran.

(Putra & Hidayah, 2023) dalam penelitian berjudul "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan PDRB terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2021", menggunakan jumlah penduduk, pendidikan, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum kabupaten/kota, serta PDRB yang menjadi variabel

independen, serta tingkat pengangguran terbuka yang menjadi variabel dependen. Penelitian ini menemukan bahwasanya jumlah penduduk dan pendidikan tidak punya pengaruh signifikan atas tingkat pengangguran. Partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh negatif, sementara upah minimum berpengaruh positif. PDRB punya pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran.

(Suprayitno & Darsyah, 2018) Iswahyudi Joko Suprayitno dan Moh. Yamin Darsyah (2018) meneliti "Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Jumlah Pengangguran di Kota Semarang". Penelitian ini menggunakan tingkat pendidikan yang menjadi variabel independen serta jumlah pengangguran yang menjadi variabel dependen. Temuan penelitian memperlihatkan bahwasanya tingkat pendidikan mempunyai pengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran. Pendidikan yang lebih tinggi disertai keterampilan yang memadai meningkatkan peluang individu untuk terserap di pasar kerja.

(Suaidah & Cahyono, 2020) meneliti "Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jombang". Penelitian ini menggunakan tingkat pendidikan sebagai variabel independen dan tingkat pengangguran yang menjadi variabel dependen. Temuan penelitian memperlihatkan bahwasanya tingkat pendidikan, khususnya lulusan SMA/Aliyah, mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengangguran. Koefisien determinasi sejumlah 56,11% menunjukkan bahwa pendidikan memberikan kontribusi besar terhadap pengangguran, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

(Prawira, 2018) meneliti "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pendidikan terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia". Penelitian ini menggunakan pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, serta tingkat pendidikan yang menjadi variabel independen, serta tingkat pengangguran terbuka yang menjadi variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi punya pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Upah minimum memiliki pengaruh positif serta signifikan, sementara tingkat pendidikan juga menunjukkan pengaruh positif serta signifikan.

(Alfinatus Suroya, 2022) meneliti "Pengaruh PDRB, IPM, Jumlah Angkatan Kerja, dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017–2022". Penelitian ini menggunakan PDRB, IPM, jumlah angkatan kerja, serta jumlah penduduk yang menjadi variabel independen, sementara tingkat pengangguran terbuka yang menjadi variabel dependen. Temuan penelitian memperlihatkan bahwasanya secara simultan, keempat variabel tersebut punya pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Namun, secara parsial, PDRB tidak punya pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan IPM, jumlah angkatan kerja, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan.

(Judijanto & Sudi, 2023) melakukan penelitian berjudul "Analysis of Economic, Education, and Skill Factors against High Unemployment: A Case Study in West Java Province". Penelitian ini menggunakan faktor ekonomi, pendidikan, serta keterampilan yang menjadi variabel independen, dengan tingginya pengangguran sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menekankan pentingnya pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dalam menurunkan tingkat pengangguran yang tinggi. Penelitian ini berkontribusi pada literatur yang ada dengan memperkaya wawasan empiris terkait berbagai faktor yang memberi pengaruh pengangguran di Provinsi Jawa Barat.

(Diakhoumpa, 2020) melakukan penelitian berjudul "Effect of Economic Growth and Inflation on Unemployment: An Empirical Analysis in Senegal from 1991 to 2018". Penelitian ini menggunakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang menjadi variabel independen, serta pengangguran yang menjadi variabel dependen. Temuan penelitian memperlihatkan hubungan negatif antara pengangguran serta pertumbuhan ekonomi, sementara inflasi memiliki hubungan positif dengan pengangguran pada kedua periode jangka panjang dan jangka pendek. Penelitian ini juga memperlihatkan tidak dijumpai hubungan kausalitas Granger antara pengangguran, pertumbuhan ekonomi, serta inflasi.

(Manaa & Muhammad Abrar, 2020) meneliti "The Effects of SMEs, Population and Education level on Unemployment in Kingdom of Bahrain". Penelitian ini menggunakan UKM, populasi, dan tingkat pendidikan menjadi variabel independen, serta pengangguran yang menjadi variabel dependen. Temuan penelitian memperlihatkan bahwasanya pertumbuhan UKM dapat mengurangi

pengangguran di Bahrain, sementara pertumbuhan populasi meningkatkan pengangguran. Tingkat pendidikan tidak signifikan menurunkan pengangguran tanpa pengalaman kerja tambahan. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah Bahrain mendukung UKM, menyediakan program pelatihan, dan memantau populasi untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja.

(Hasan & Sasana, 2020) melakukan penelitian berjudul "Determinants of Youth Unemployment Rate in ASEAN". Penelitian ini menggunakan PDB, FDI, inflasi, dan IPM yang menjadi variabel independen, dengan tingkat pengangguran muda yang menjadi variabel dependen. Temuan penelitian memperlihatkan bahwasanya PDB, FDI, serta inflasi memiliki pengaruh negatif serta signifikan terhadap tingkat pengangguran muda, sedangkan indeks pembangunan manusia (IPM) dan populasi usia 0-14 tahun mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran muda di ASEAN.

(Baah-Boateng, 2013) melakukan penelitian berjudul "Determinants of Unemployment in Ghana". Penelitian ini menggunakan pendidikan dan upah yang menjadi variabel independen, serta pengangguran yang menjadi variabel dependen. Temuan penelitian memperlihatkan bahwasanya individu dengan pendidikan dasar dan menengah memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Upah yang tinggi berhubungan positif dengan tingkat pengangguran, di mana pencari kerja dengan harapan upah yang tinggi cenderung lebih sulit mendapatkan pekerjaan.

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini mencakup variabel independen yang akan mempengaruhi tingkat pengangguran di lima provinsi yang menjadi fokus penelitian, yaitu DKI Jakarta, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan Papua Barat.

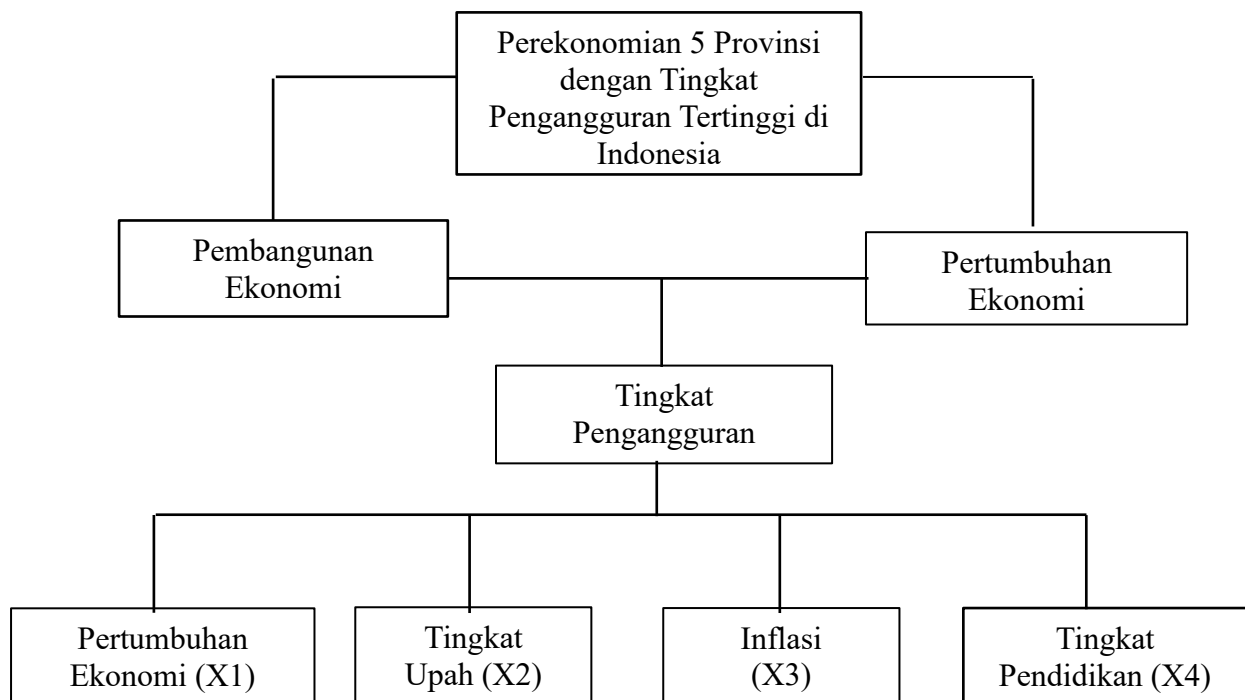
Secara teori, pertumbuhan ekonomi seharusnya menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Ketika PDRB meningkat, perusahaan cenderung memperluas produksi dan membuka lowongan kerja baru. Namun, jika pertumbuhan ekonomi hanya terjadi di sektor-sektor padat modal atau teknologi tinggi yang tidak banyak menyerap tenaga kerja, maka pengaruhnya terhadap pengurangan pengangguran menjadi kurang maksimal.

Upah minimum juga memiliki peran penting. Di satu sisi, kenaikan upah dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong partisipasi kerja. Tapi di sisi lain, jika upah terlalu tinggi dan tidak seimbang dengan produktivitas, perusahaan bisa mengurangi tenaga kerja untuk menekan biaya. Akibatnya, pengangguran justru bisa meningkat.

Inflasi merupakan variabel ekonomi makro yang tidak bisa diabaikan. Dalam jumlah yang wajar, inflasi bisa menjadi tanda ekonomi yang tumbuh. Tapi inflasi yang tinggi bisa menekan daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya operasional perusahaan.

Tingkat pendidikan juga menjadi faktor penting. Semakin tinggi pendidikan seseorang, biasanya semakin besar peluangnya untuk bekerja. Namun kenyataannya, tidak sedikit lulusan perguruan tinggi yang masih menganggur karena keterampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Ini menunjukkan bahwa pendidikan formal saja belum cukup tanpa didukung keterampilan yang relevan.

Karena itu, penelitian ini penting untuk melihat apakah keempat variabel tersebut benar-benar berpengaruh terhadap pengangguran di lima provinsi ini.



Gambar 2. 1

Kerangka Berpikir

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan asumsi awal yang diajukan sebelum penelitian dilakukan dan perlu diuji lebih lanjut untuk membuktikan kebenarannya. Hipotesis yang diajukan di penelitian ini meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di lima provinsi di Indonesia selama periode 2013-2023. Sedangkan, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Inflasi diduga berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran di lima provinsi di Indonesia selama periode 2013-2023.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang bersifat sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Umar, 2004: 42).

Dalam penelitian ini, digunakan data sekunder dengan model data panel. Model ini menggabungkan data time series dan cross-sectional yang diperoleh dari berbagai sumber resmi. Penggunaan data panel membantu analisis menjadi lebih komprehensif karena dapat melihat variasi antar waktu dan antar provinsi secara bersamaan, serta melihat perbedaan karakteristik antar provinsi.

3.1.2 Sumber Data

Data sekunder ini diperoleh melalui berbagai sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), serta publikasi pemerintah lainnya yang sesuai. Data yang digunakan mencakup data tahunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Provinsi (UMP), tingkat inflasi, serta tingkat pendidikan yang diukur dari rata-rata lama sekolah, dan tingkat pengangguran di lima provinsi selama periode 2013-2023.

3.2 Metodologi Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui laporan tahunan, publikasi statistik, yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengakses webside atau publikasi resmi yang tersedia, lalu mengunduh data yang relevan sesuai kebutuhan penelitian. Data yang dianalisis berbentuk time series selama periode 11 tahun (2013–2023) dan mencakup lima provinsi di Indonesia, yaitu Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Papua Barat.

Pemilihan lima provinsi ini sebagai fokus penelitian tidak hanya didasarkan pada tingginya angka pengangguran, tetapi juga karena memiliki potensi dalam

memberikan gambaran penting untuk penyusunan kebijakan nasional. Sebagai pusat-pusat ekonomi utama, pola ketenagakerjaan di provinsi-provinsi ini sering menjadi indikator awal terhadap tren ketenagakerjaan nasional, sehingga dapat membantu memahami dinamika pasar tenaga kerja Indonesia secara lebih menyeluruh.

3.3 Metode dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif untuk analisis data. Metode deskriptif kuantitatif adalah suatu pendekatan yang menggabungkan analisis deskriptif dan kuantitatif untuk menggambarkan fenomena atau karakteristik dari variabel-variabel yang diteliti secara sistematis, faktual, dan akurat. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data numerik dan penerapan teknik statistik untuk mengukur serta mengevaluasi hubungan antar variabel.

3.3.1 Analisis Perkembangan

Dalam penelitian ini, untuk membahas perumusan masalah pertama peneliti mengumpulkan data kuantitatif, contohnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Provinsi (UMP), tingkat inflasi, rata-rata lama sekolah, serta tingkat pengangguran di lima provinsi.

Untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi, tingkat upah, inflasi, dan tingkat pendidikan maka digunakan formula hitungnyanya sebagai berikut:

$$GX = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

GX = Variabel yang diteliti (Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Upah, Inflasi, Tingkat Pendidikan)

X_t = Nilai Variabel pada periode saat ini

X_{t-1} = Nilai variabel pada periode sebelumnya.

Hasil analisis ditampilkan melalui bentuk tabel, grafik, serta narasi yang menjelaskan temuan-temuan statistik. Metode ini membantu peneliti tidak hanya menggambarkan keadaan variabel-variabel yang diteliti, tetapi juga mengidentifikasi pola, tren, serta hubungan yang mungkin ada di antara variabel-variabel tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan objektif terhadap topik yang sedang diteliti.

3.3.2 Analisis Pengaruh

Dalam penelitian ini, untuk membahas perumusan masalah kedua maka peneliti menggunakan pendekatan model regresi data panel untuk menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi, tingkat upah, inflasi, serta tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran. Bentuk umum dari persamaan regresi data panel yang dipergunakan di penelitian ini ialah:

$$TPT_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 UMP_{it} + \beta_3 INF_{it} + \beta_4 PEND_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- TPT_{it} : Tingkat Pengangguran Terbuka di provinsi i pada tahun t
- $PDRB_{it}$: Produk Domestik Regional Bruto di provinsi i pada tahun t
- UMP_{it} : Upah Minimum Provinsi di provinsi i pada tahun t
- INF_{it} : Tingkat Inflasi di provinsi i pada tahun t
- $PEND_{it}$: Rata-rata Lama Sekolah di provinsi i pada tahun t
- β_0 : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien regresi untuk setiap variabel independen
- ε_{it} : Error term
- i : Provinsi yang diteliti (Banten, Kepulauan Riau, Jawa Barat, DKI Jakarta, Papua Barat)
- t : Periode penelitian (2013-2023)

Metode regresi data panel dipilih karena dapat menganalisis data dari berbagai provinsi dalam kurun waktu tertentu secara bersamaan. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat upah, inflasi, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran. Selain itu, model data panel memiliki sejumlah keunggulan, seperti meningkatkan jumlah observasi, memperbesar derajat kebebasan, mengurangi potensi multikolinearitas antar variabel.

3.4 Pendekatan Perhitungan Model Regresi Data Panel

Pendekatan model regresi data panel ialah metode statistik yang digunakan dalam melakukan analisis terhadap data yang memuat dimensi ruang (cross-sectional) dan waktu (time series) secara bersamaan. Dalam penerapannya, terdapat tiga pendekatan utama yang sering digunakan, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), serta Random Effect Model (REM).

Common Effect Model (CEM) mengasumsikan bahwa nilai intersep serta kemiringan (slope) bersifat sama untuk seluruh unit cross-section serta periode waktu. Fixed Effect Model (FEM) memungkinkan adanya variasi intersep antar unit cross-section, tetapi slope tetap konstan. Di sisi lain, Random Effect Model (REM) mengakomodasi perbedaan karakteristik seseorang serta waktu dengan memasukkannya ke dalam komponen error pada model.

Penentuan model terbaik dalam regresi data panel dilakukan melalui beberapa uji statistik, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Pendekatan ini memiliki sejumlah keunggulan, antara lain mampu mengontrol variabel yang tidak teramati atau tidak terukur, mengurangi masalah kolinearitas antar variabel, serta meningkatkan derajat kebebasan. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan menghasilkan estimasi ekonometrik yang lebih akurat dan efisien.

3.4.1 Pendekatan Pooled Least Square (PLS) / Common Effect Model (CEM)

Pendekatan Pooled Least Square (PLS) atau Common Effect Model (CEM) adalah metode dasar dalam estimasi data panel yang mengasumsikan bahwa nilai intersep dan koefisien slope bersifat konstan, baik antara waktu maupun antar individu (Gujarati & Porter, 2009). Model ini menggabungkan seluruh data time series dan cross-section, sehingga tidak memperhitungkan dimensi waktu dan ruang dalam data panel (Widarjono, 2013). Dalam proses estimasinya, CEM menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dengan anggapan bahwa perilaku data antar unit cross-sectional dianggap seragam di berbagai periode waktu. (Basuki & Prawoto, 2016).

Meskipun tergolong sederhana, pendekatan ini memiliki kelemahan karena tidak dapat menangkap keragaman (heterogenitas) antar subjek, yang berpotensi menyebabkan model yang dihasilkan menjadi bias (Baltagi, 2008). Oleh karena itu,

CEM biasanya digunakan sebagai langkah awal atau pembanding sebelum memilih model yang lebih kompleks, seperti Fixed Effect Model atau Random Effect Model, yang lebih efektif dalam mengatasi perbedaan antar unit dalam data panel.

3.4.2 Pendekatan Fixed Effect Model (FEM)

Pendekatan Fixed Effect Model (FEM) yaitu metode estimasi dalam analisis regresi data panel yang mempertimbangkan adanya ketidaksamaan karakteristik individu antar unit cross-section (Greene, 2012). FEM mengasumsikan bahwa intersep untuk tiap unit cross-section dapat bervariasi, namun koefisien slope tetap sama antara unit dan waktu (Baltagi, 2021). Pendekatan ini memungkinkan model untuk mengatasi perbedaan antar unit dengan mengontrol faktor-faktor yang sulit diukur, yang tetap sama seiring waktu, dan tidak mempengaruhi variabel yang diuji

Metode Fixed Effect Model (FEM) menggunakan teknik variabel dummy untuk mengetahui perbedaan intersep antar unit, yang juga dikenal dengan model Least Squares Dummy Variable (LSDV). FEM sangat berguna ketika ada perbedaan yang tidak teramati antar unit yang berkaitan dengan variabel independen dalam model. Dengan pendekatan ini, kita bisa mengontrol efek-efek yang tidak terlihat tetapi mempengaruhi variabel dependen, sehingga mengurangi bias yang muncul akibat perbedaan karakteristik antar unit yang tidak terukur (Hsiao, 2014).

Fixed Effect Model (FEM) memiliki keunggulan untuk mengendalikan efek variabel yang dihilangkan, yang berbeda antar individu namun tetap konstan sepanjang waktu. Hal ini membantu mengurangi bias dalam estimasi (Cameron, A. C., & Trivedi, 2005). Namun, FEM juga memiliki kelemahan, yaitu konsumsi derajat kebebasan yang tinggi, terutama jika jumlah unit cross-section sangat besar. Hal ini dapat menyebabkan masalah multikolinearitas, di mana variabel independen menjadi sangat berkorelasi satu sama lain, yang dapat memengaruhi kestabilan hasil estimasi (Gujarati, D. N., & Porter, 2009).

3.4.3 Pendekatan Random Effect Model (REM)

Pendekatan Random Effect Model (REM) yaitu metode estimasi dalam analisis regresi data panel yang menganggap bahwasanya ketidaksamaan karakteristik individu dan waktu diakomodasi dalam error model (Gujarati, D. N., & Porter, 2009). REM menganggap bahwa intersep setiap unit cross-section sifatnya

acak dan berasal dari populasi yang lebih besar dengan nilai rerata konstan (Greene, 2012).

REM memiliki keunggulan untuk memperhitungkan perbedaan antar individu dan waktu, serta efisiensinya dalam menggunakan derajat kebebasan (Hsiao, 2014). Namun, REM memiliki asumsi yang lebih ketat dibandingkan dengan Fixed Effect Model, yaitu bahwa karakteristik individu tidak berhubungan dengan variabel penjelas dalam model. Pemilihan antara REM dan model lainnya biasanya dilakukan melalui uji Hausman, yang membandingkan estimator yang konsisten (FEM) dengan estimator yang efisien (REM) (Cameron, A. C., & Trivedi, 2005).

3.5 Pengujian Model Regresi Data Panel

Pengujian model regresi data panel merupakan langkah penting untuk menentukan model yang paling sesuai dengan karakteristik data dan tujuan penelitian. Terdapat tiga model utama yang biasa dibandingkan, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Untuk memilih model yang tepat, beberapa uji statistik digunakan. Uji Chow digunakan untuk mengetahui apakah model FEM lebih baik dibandingkan CEM. Uji Hausman digunakan untuk membandingkan FEM dan REM guna memilih model yang paling sesuai. Sementara itu, Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk mengetahui apakah model REM lebih baik daripada model CEM atau OLS (Ordinary Least Squares) (Baltagi, 2008).

3.5.1 Uji Chow

Uji Chow merupakan salah satu metode formal dalam analisis regresi data panel yang digunakan untuk menentukan apakah Common Effect Model (CEM) atau Fixed Effect Model (FEM) lebih tepat digunakan. Uji ini dikembangkan oleh Gregory Chow pada tahun 1960 dan menjadi alat penting dalam ekonometrika panel.

Tujuan utama uji ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan intersep yang signifikan antar unit cross-section. Hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa model CEM lebih tepat, sedangkan hipotesis alternatif (H_1) menyatakan bahwa model FEM lebih sesuai.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan statistik F untuk membandingkan nilai Sum of Squared Residuals (SSR) dari kedua model. Jika nilai F yang dihasilkan signifikan, maka model FEM dianggap lebih tepat dibandingkan dengan CEM.

Hipotesis yang diuji dalam Uji Chow meliputi:

Hipotesis :

H0 : Common Effect Model (CEM)

H1 : Fixed Effect Model (FEM)

Keputusan :

- Bila Chi-Square $< 0,05$ (5%), dengan demikian H0 tidak disetujui serta terima H1, maknanya model yang terpilih ialah Fixed Effect Model.
- Bila Chi-Square $> 0,05$ (5%), dengan demikian H0 diterima serta H1 ditolak, maknanya model yang terpilih ialah Common Effect Model.

3.5.2 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model terbaik antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) dalam analisis data panel. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara efek individual yang tidak teramati dengan variabel independen.

Uji Hausman membandingkan estimasi FEM (konsisten) dengan REM (efisien), dan menggunakan distribusi chi-square. Meskipun berguna, uji ini sensitif terhadap pelanggaran asumsi seperti homoskedastisitas dan autokorelasi, sehingga sebaiknya didukung dengan uji tambahan.

Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada hubungan, sehingga model REM lebih tepat. Jika hasil uji signifikan, maka hipotesis nol ditolak dan model FEM lebih sesuai karena REM bisa menghasilkan estimasi yang bias.

Uji Hausman dilaksanakan melalui uji hipotesis yang meliputi:

Hipotesis :

H0 : Random Effect Model (REM)

H1 : Fixed Effect Model (FEM)

Keputusan :

- Bila Chi-Square $< 0,05$ (5%), dengan demikian H0 ditolak serta terima H1, maknanya model yang terpilih ialah Fixed Effect Model.

- Bila Chi-Square $> 0,05$ (5%), dengan demikian H_0 diterima serta H_1 ditolak, maknanya model yang terpilih ialah Random Effect Model.

3.5.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk menentukan apakah model Random Effect (REM) lebih tepat dibandingkan Common Effect Model (CEM) atau Pooled OLS. Uji ini dikembangkan oleh (Breusch dan Pagan, 1980) dan menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antar individu yang tidak teramati.

Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada efek individual (varians error = 0). Jika nilai statistik LM signifikan, maka model REM lebih sesuai. Sebaliknya, jika tidak signifikan, model CEM dianggap lebih tepat. Uji ini penting karena dapat mendeteksi keberagaman antar unit yang tidak terlihat oleh variabel dalam model.

Hipotesis pada Uji Lagrange Multiplier meliputi:

Hipotesis :

H_0 : Common Effect Model (CEM)

H_1 : Random Effect Model (REM)

Keputusan :

- Jika LM hitung $<$ Chi-Square, dengan demikian H_0 ditolak serta terima H_1 , maknanya model yang terpilih ialah Random Effect Model.
- Jika LM hitung $>$ Chi-Square, dengan demikian H_0 diterima serta H_1 ditolak, maknanya model yang terpilih ialah Common Effect Model.

3.6 Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum melaksanakan analisis regresi melalui metode Ordinary Least Square (OLS), penting untuk melakukan asumsi klasik terlebih dahulu. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian valid, serta koefisien regresi yang dihasilkan bersifat efisien dan tidak bias. Namun, tidak semua model regresi berbasis OLS mengharuskan pengujian seluruh asumsi klasik. Menurut (Basuki & Prawoto, 2016), terdapat beberapa jenis pengujian yang perlu dilakukan untuk memastikan kelayakan model regresi yang digunakan.

3.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah satu di antara asumsi yang penting dalam analisis statistik, termasuk regresi data panel. Tujuan utama uji ini adalah untuk menentukan apakah residual atau error term dalam model regresi terdistribusi normal (Gujarati, D. N., & Porter, 2009). Normalitas residual sangat penting karena berbagai uji statistik, seperti uji t dan F, mengungkapkan bahwasanya residual mengikuti distribusi normal agar dapat menghasilkan inferensi yang valid. Beberapa metode yang umum dipergunakan dalam melakukan uji normalitas termasuk uji Jarque-Bera, uji Shapiro-Wilk, dan uji Kolmogorov-Smirnov (Greene, 2012).

Uji Jarque-Bera, misalnya, menguji hipotesis nol bahwa skewness dan kurtosis dari residual sejalan dengan distribusi normal. Selain uji formal, metode grafis seperti histogram residual dan plot quantile-quantile (Q-Q plot) sering digunakan untuk menilai normalitas secara visual. Dalam analisis data panel, uji normalitas dilakukan pada residual dari model yang dipilih setelah estimasi. Jika asumsi normalitas dilanggar, peneliti mungkin perlu mempertimbangkan transformasi variabel, mendeteksi dan menangani outlier, atau menggunakan metode estimasi yang tahan terhadap pelanggaran normalitas, seperti Generalized Method of Moments (GMM) (Baltagi, 2008). Perlu dicatat bahwa pada sampel besar, pelanggaran asumsi normalitas mungkin tidak terlalu bermasalah karena teorema limit pusat menunjukkan bahwa statistik uji akan mendekati distribusi normal (Hsiao, 2014).

Hipotesis :

H0 : Residual memiliki distribusi normal

H1 : Residual tidak memiliki distribusi normal

Keputusan :

- Bila nilai probability $< \alpha$ (5%), dengan demikian H0 ditolak serta terima H1, maknanya residual tidak memiliki distribusi normal.
- Bila nilai probability $> \alpha$ (5%), dengan demikian H0 diterima serta tolak H1, maknanya residual memiliki distribusi normal.

3.6.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah langkah penting dalam analisis regresi yang bertujuan untuk mendeteksi adanya hubungan linier yang kuat antara variabel independen dalam model. Multikolinieritas terjadi ketika variabel-variabel independen saling berkorelasi tinggi, yang dapat menyebabkan masalah seperti ketidakstabilan nilai koefisien regresi dan menurunnya akurasi prediksi model.

Masalah multikolinieritas dapat mempengaruhi koefisien regresi, membuatnya tidak stabil dan sulit diandalkan. Hal ini juga menyulitkan interpretasi hasil regresi, karena tidak dapat dengan jelas menentukan pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel dependen. Selain itu, multikolinieritas dapat meningkatkan variansi koefisien, menjadikannya lebih sensitif terhadap perubahan data.

Beberapa metode untuk mendeteksi multikolinieritas antara lain adalah Variance Inflation Factor (VIF), yang mengukur seberapa besar peningkatan variansi koefisien akibat multikolinieritas. Nilai VIF yang lebih dari 10 menunjukkan adanya masalah multikolinieritas. Selain itu, toleransi, yang merupakan kebalikan dari VIF, serta analisis matriks korelasi antar variabel juga dapat digunakan untuk mendeteksi masalah ini. Nilai condition index yang tinggi juga bisa menjadi indikasi adanya multikolinieritas.

Untuk mengatasi multikolinieritas, beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain menghapus variabel independen yang sangat berkorelasi, menggabungkan variabel-variabel yang berkorelasi tinggi menjadi satu variabel komposit, atau menggunakan teknik regularisasi seperti Ridge Regression atau Lasso Regression, yang memberikan penalti pada koefisien regresi. Transformasi data, seperti normalisasi atau standarisasi, juga dapat membantu mengurangi masalah multikolinieritas.

Hipotesis uji Multikolinieritas bisa disusun yang meliputi:

Hipotesis :

H₀ : ada multikolinieritas antar variabel bebas

H₁ : tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas

Keputusan :

- Bila nilai $VIF < 10$, dengan demikian H_0 ditolak serta terima H_1 , maknanya tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas.
- Bila nilai $VIF > 10$, dengan demikian H_0 diterima serta tolak H_1 , maknanya ada multikolinieritas antar variabel bebas.

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah prosedur dalam analisis regresi yang digunakan untuk mendeteksi adanya perbedaan varians error di sepanjang rentang nilai prediktor atau variabel independen. Dalam model regresi yang ideal, diharapkan varians error tetap konstan, yang dikenal dengan istilah homoskedastisitas. Namun, jika varians error tidak konstan dan berubah-ubah, hal ini disebut heteroskedastisitas. Keberadaan heteroskedastisitas dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi kurang efisien dan menghasilkan standar error yang bias. Akibatnya, hal ini dapat mengganggu validitas uji hipotesis dan menurunkan akurasi prediksi model.

Untuk mendeteksi heteroskedastisitas, beberapa uji dapat dilakukan, seperti uji Breusch-Pagan, yang memeriksa apakah varians error bergantung pada nilai variabel independen, atau uji White, yang lebih umum dan tidak mengasumsikan bentuk spesifik dari heteroskedastisitas. Selain itu, analisis grafis seperti plot residual terhadap nilai prediksi juga dapat membantu mengidentifikasi pola heteroskedastisitas. Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan seperti transformasi variabel, penggunaan estimasi robust standard errors, atau penerapan model regresi yang diperbaiki seperti Generalized Least Squares (GLS) dapat digunakan. Dengan menangani heteroskedastisitas, kualitas dan akurasi model regresi dapat ditingkatkan, sehingga menghasilkan hasil analisis yang lebih valid.

3.7 Pengujian Hipotesis

Selain melakukan uji asumsi klasik, pengujian statistik juga dilaksanakan untuk mengevaluasi keakuratan model dalam mengestimasi nilai aktual melalui fungsi regresi. Pengujian ini meliputi beberapa langkah penting, yaitu koefisien determinasi (R^2), uji simultan koefisien regresi (uji F), dan uji parsial koefisien regresi (uji t).

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa baik model regresi dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen yang disebabkan oleh variabel independen. Uji F digunakan untuk menilai pengaruh seluruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, yakni apakah variabel-variabel independen memberikan kontribusi yang signifikan secara bersama-sama. Sementara itu, uji t digunakan untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individu, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi setiap variabel dalam model.

Secara keseluruhan, pengujian-pengujian ini membantu untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan akurat dan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

3.7.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F signifikansi simultan digunakan untuk menguji pengaruh bersama dari semua variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu model regresi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah secara keseluruhan variabel-variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Pada uji F, tingkat signifikansi yang umumnya digunakan adalah 0,01 (1%), 0,05 (5%), dan 0,10 (10%). Tingkat signifikansi ini menunjukkan seberapa besar tingkat kepercayaan yang digunakan untuk menentukan apakah variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji Signifikansi Parsial (Uji t) digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah dalam model regresi. Uji t dilakukan dengan menggunakan rumus dan hipotesis sebagai berikut:

$$t = \frac{\beta_1}{\text{Sec}(\beta_1)}$$

$$\text{Sec}(\beta_1)$$

Hipotesis:

- $H_0 : \beta_i = 0$ (variabel bebas tidak signifikan terhadap variabel terikat)
- $H_1 : \beta_i \neq 0$ (variabel bebas signifikan terhadap variabel terikat)

3.7.3 Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen dalam model regresi. Nilai R^2 berada dalam rentang antara 0 hingga 1. Nilai R^2 yang rendah menunjukkan bahwa variabel independen memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variasi variabel dependen, sementara nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen hampir sepenuhnya dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen.

3.8 Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini meliputi beberapa variabel utama:

1. Pertumbuhan Ekonomi (X_1) diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, satuannya Rupiah. PDRB menunjukkan nilai tambah dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah dalam periode tertentu, dan digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).
2. Tingkat Upah (X_2) diukur menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang juga dinyatakan dalam Rupiah. UMP adalah batas minimum upah yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja di suatu provinsi. Data UMP diperoleh dari BPS.
3. Inflasi (X_3) diukur dengan tingkat inflasi tahunan dalam persentase (%). Inflasi ini menunjukkan seberapa besar kenaikan harga barang dan jasa dari tahun ke tahun, yang bisa memengaruhi daya beli masyarakat. Data ini juga bersumber dari BPS.
4. Tingkat Pendidikan (X_4) diukur menggunakan rata-rata lama sekolah (dalam tahun). Indikator ini menunjukkan rata-rata jumlah tahun sekolah yang telah diselesaikan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Data diperoleh dari BPS.
5. Tingkat Pengangguran (Y) diukur menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang dinyatakan dalam persentase (%). TPT menunjukkan persentase angkatan kerja yang belum bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan. Data ini juga diperoleh dari BPS.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Kondisi Geografis Lima Provinsi

Pemilihan wilayah dalam penelitian ini didasarkan pada perbedaan karakteristik geografis, administratif, topografi, dan kondisi iklim. Keberagaman ini diharapkan bisa mewakili kondisi nyata di berbagai daerah di Indonesia, sehingga hasil penelitian menjadi lebih relevan dan menggambarkan masalah yang dikaji secara menyeluruh.

Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah yang memiliki signifikansi tinggi secara nasional, mengingat statusnya sebagai ibu kota negara serta pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Secara astronomis, DKI Jakarta terletak pada koordinat $5^{\circ}19'12'' - 6^{\circ}23'54''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ}12'42'' - 107^{\circ}37'04''$ Bujur Timur. Secara geografis, wilayah ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Provinsi Banten di barat, serta Provinsi Jawa Barat di selatan dan timur. Luas wilayah DKI Jakarta mencapai $661,52 \text{ km}^2$ dan seluruhnya merupakan daratan, yang mencerminkan karakteristik wilayah urban yang padat serta memiliki infrastruktur yang relatif maju dibandingkan provinsi lainnya.

Provinsi Banten yang terletak di bagian barat Pulau Jawa juga menjadi bagian penting dalam cakupan wilayah penelitian. Secara astronomis, provinsi ini berada pada $5^{\circ}07'50'' - 7^{\circ}01'11''$ Lintang Selatan dan $105^{\circ}01'11'' - 106^{\circ}07'12''$ Bujur Timur. Banten berbatasan dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta di utara, Samudra Hindia di selatan, Provinsi Jawa Barat di timur, serta Selat Sunda di barat. Letak geografis tersebut memberikan Banten posisi strategis dalam jalur distribusi barang dan mobilitas antar pulau, khususnya melalui Pelabuhan Merak. Luas wilayahnya mencapai $9.662,92 \text{ km}^2$, dengan karakteristik wilayah yang terdiri dari dataran rendah pesisir hingga perbukitan di pedalaman.

Di wilayah barat laut Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau menampilkan karakteristik geografis kepulauan yang dominan. Terletak pada koordinat $0^{\circ}29'04'' - 4^{\circ}45'12''$ Lintang Utara dan $103^{\circ}22'36'' - 109^{\circ}43'36''$ Bujur Timur, wilayah ini berbatasan langsung dengan Malaysia di utara, Laut Natuna di barat, Laut Cina Selatan di timur, serta Provinsi Jambi di selatan. Dengan luas wilayah sebesar

8.201,72 km², provinsi ini terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil. Kondisi geografis tersebut menjadikan Kepulauan Riau sebagai wilayah dengan tantangan tersendiri dalam hal konektivitas, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya kelautan.

Adapun Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Secara astronomis, provinsi ini berada pada 5°50' – 7°50' Lintang Selatan dan 104°48' – 108°48' Bujur Timur. Jawa Barat berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Samudra Hindia di selatan, Provinsi Banten dan DKI Jakarta di barat, serta Provinsi Jawa Tengah di timur. Luas wilayahnya mencapai 35.377,76 km². Topografi Jawa Barat yang didominasi oleh pegunungan serta kawasan perkotaan dan industri yang berkembang pesat, memberikan kompleksitas tersendiri dalam pengelolaan lingkungan dan tata ruang wilayah.

Sementara itu, Provinsi Papua Barat yang terletak di kawasan timur Indonesia memperlihatkan karakteristik geografis yang sangat berbeda dibandingkan dengan wilayah lainnya dalam penelitian ini. Secara astronomis, Papua Barat berada pada 0°45' – 4°25' Lintang Selatan dan 130°45' – 136°50' Bujur Timur. Wilayah ini berbatasan dengan Provinsi Papua di sebelah timur, Samudra Pasifik di utara, Laut Seram di selatan, serta Provinsi Maluku di sebelah barat. Papua Barat memiliki luas wilayah sebesar 102.955,15 km² yang mencakup kawasan pegunungan, hutan hujan tropis, serta garis pantai yang luas. Kondisi geografis tersebut menjadikan Papua Barat sebagai wilayah dengan potensi sumber daya alam yang tinggi namun menghadapi tantangan besar dalam hal pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas antarwilayah.

Selain itu, Topografi dan iklim juga merupakan dua aspek penting dalam analisis wilayah karena berpengaruh langsung terhadap tata ruang, penggunaan lahan, dan pembangunan daerah. Perbedaan kondisi topografi dan iklim di suatu wilayah dapat memengaruhi tingkat kemudahan akses, produktivitas wilayah, hingga risiko terhadap bencana. Oleh karena itu, kedua aspek ini menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik geografis daerah.

- Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian antara 0–50 meter di atas permukaan laut (mdpl). Iklim di wilayah ini bersifat tropis dengan suhu rata-rata berkisar antara 24°C hingga 33°C. Sebagai ibu kota negara, Jakarta memiliki kompleksitas urbanisasi dan infrastruktur yang tinggi.
- Sementara itu, Provinsi Banten memiliki variasi topografi yang lebih kompleks, mulai dari dataran rendah di wilayah utara seperti Kota dan Kabupaten Tangerang, hingga perbukitan dan Pegunungan Kendeng di wilayah selatan seperti Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang mencapai ketinggian hingga 1.000 mdpl. Suhu rata-rata di Banten berkisar antara 23°C hingga 33°C.
- Kepulauan Riau memiliki topografi yang didominasi oleh wilayah kepulauan dan dataran rendah dengan ketinggian antara 0–300 mdpl. Iklimnya adalah maritim tropis, dengan suhu berkisar antara 25°C hingga 31°C, dipengaruhi oleh angin laut serta tingkat kelembaban yang relatif tinggi.
- Jawa Barat merupakan provinsi dengan topografi paling bervariasi. Wilayah utara didominasi oleh dataran rendah, sedangkan bagian tengah dan selatan merupakan kawasan pegunungan, seperti di Bogor, Bandung, dan Garut, dengan ketinggian mencapai 3.000 mdpl. Iklim di wilayah ini cenderung bervariasi, tergantung pada ketinggian, dengan suhu berkisar antara 18°C hingga 32°C.
- Papua Barat memiliki topografi yang sangat kompleks dan unik, dengan dominasi wilayah pegunungan tinggi dan hutan hujan tropis. Daerah pegunungan Arfak mencapai ketinggian hingga 4.800 mdpl, sementara wilayah pesisir berada pada ketinggian 0–50 mdpl. Papua Barat memiliki iklim tropis basah, dengan suhu rata-rata 18°C hingga 30°C sepanjang tahun.

Selain perbedaan dalam karakteristik wilayah dan struktur kewilayahan, setiap provinsi juga memiliki kawasan strategis yang berperan penting dalam mendorong pembangunan di berbagai sektor. Kawasan ini menjadi pusat kegiatan yang strategis, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, maupun pertahanan dan keamanan. Keberadaan dan pengembangan kawasan strategis

tersebut menunjukkan kontribusi besar terhadap arah kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Adapun kawasan strategis di kelima provinsi yang menjadi lokasi penelitian sebagai berikut:

- Provinsi DKI Jakarta
 - Kawasan Strategis Pusat Pemerintahan dan Bisnis Jakarta Pusat.
 - Kawasan Strategis Pelabuhan Tanjung Priok sebagai Pintu Utama Perdagangan Internasional.
 - Kawasan Strategis Koridor Ekonomi Sudirman–Thamrin–Kuningan.
 - Kawasan Strategis Wisata Kota Tua dan Kepulauan Seribu.
- Provinsi Banten
 - Kawasan Strategis Industri Cilegon dan Serang.
 - Kawasan Strategis Pelabuhan Merak sebagai Penghubung Jawa–Sumatra.
 - Kawasan Strategis Pariwisata Pantai Anyer dan Tanjung Lesung.
 - Kawasan Konservasi Taman Nasional Ujung Kulon.
- Provinsi Kepulauan Riau
 - Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun.
 - Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Batam.
 - Kawasan Wisata Bahari Anambas dan Natuna.
 - Kawasan Konservasi Laut Natuna dan Lingga.
- Provinsi Jawa Barat
 - Kawasan Industri Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.
 - Kawasan Ekonomi Bandung Raya.
 - Kawasan Pariwisata Puncak dan Pangandaran.
 - Kawasan Konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
- Provinsi Papua Barat
 - Kawasan Pertambangan Sorong dan Teluk Bintuni.
 - Kawasan Wisata Bahari Raja Ampat.
 - Kawasan Konservasi Laut Taman Nasional Teluk Cenderawasih.
 - Kawasan Strategis Pertahanan Nasional di Perbatasan Pasifik.

Penetapan kawasan-kawasan tersebut sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) mempertimbangkan kontribusinya terhadap aspek kehidupan daerah, khususnya dalam hal ekonomi, sosial, budaya, serta potensi sumber daya dan dukungan teknologi (Bappeda, 2016).

4.2 Kondisi Penduduk di Lima Provinsi

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Karena itu, memahami kondisi kependudukan menjadi hal yang penting dalam mendukung penyusunan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (2022), penduduk adalah setiap orang yang tinggal di suatu wilayah selama enam bulan atau lebih, atau yang berniat menetap meskipun belum mencapai jangka waktu tersebut.

Data kependudukan di lima provinsi yang menjadi fokus penelitian menunjukkan tren pertumbuhan yang bervariasi selama tahun 2013 hingga 2023. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti urbanisasi, perkembangan ekonomi, dan mobilitas penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 2 Kondisi Penduduk di Lima Provinsi Tahun 2013–2023

Tahun	DKI Jakarta	Banten	Kep. Riau	Jawa Barat	Papua Barat
2013	9.902.000	10.123.500	1.841.000	43.021.826	760.000
2014	9.997.000	10.276.000	1.875.000	43.569.000	785.000
2015	10.092.000	10.432.000	1.912.000	44.126.000	812.000
2016	10.186.000	10.589.000	1.951.000	44.693.000	841.000
2017	10.278.000	10.749.000	1.992.000	45.269.000	872.000
2018	10.370.000	10.912.000	2.035.000	45.854.000	905.000
2019	10.462.000	11.077.000	2.080.000	46.449.000	940.000
2020	10.553.000	11.244.000	2.127.000	47.053.000	977.000
2021	10.644.000	11.413.000	2.176.000	47.666.000	1.016.000
2022	10.746.000	11.583.000	2.227.000	48.288.000	1.057.000
2023	11.248.000	12.347.000	2.197.000	49.317.513	1.180.000

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat di Provinsi Papua Barat dengan rata-rata sebesar 4,63% per tahun. Sebaliknya, tingkat pertumbuhan terendah tercatat di Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 1,27% per tahun. Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah

dengan jumlah penduduk terbesar, sedangkan Papua Barat memiliki jumlah penduduk paling sedikit. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan distribusi penduduk antardaerah, yang berpotensi memengaruhi perencanaan pembangunan wilayah serta penyediaan layanan publik.

4.3 Kondisi Tingkat Pengangguran di Lima Provinsi

Untuk melihat dinamika ketenagakerjaan di lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia, diperlukan penelusuran terhadap perkembangan tingkat pengangguran terbuka (TPT) selama periode 2013–2023. Data berikut menyajikan persentase TPT tahunan di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan Papua Barat. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai fluktuasi angka pengangguran di masing-masing provinsi serta perbandingannya dengan rata-rata nasional.

Tabel 4. 3 Tingkat Pengangguran di Lima Provinsi tahun 2013-2023

Tahun	Tingkat Pengangguran (Persen)				
	DKI Jakarta	Banten	Kep. Riau	Jawa Barat	Papua Barat
2013	8,39	9,78	9,95	8,37	9,33
2014	8,47	9,49	9,57	8,40	8,91
2015	6,73	8,64	7,71	8,89	9,28
2016	5,62	7,92	6,74	8,89	8,38
2017	6,08	8,52	6,61	8,22	7,58
2018	5,16	8,52	6,33	7,73	6,44
2019	5,00	8,11	6,21	7,82	5,82
2020	10,95	10,64	10,12	10,46	6,88
2021	10,48	9,86	9,91	9,82	6,14
2022	8,42	8,09	9,42	8,31	5,63
2023	7,87	7,72	8,98	7,57	5,10
Rata-rata	7,50	8,75	8,32	8,55	7,22

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional selama periode 2013–2023 berada pada kisaran 5,28% hingga 7,07%, dengan rata-rata sebesar 6,17%. Jika dibandingkan dengan rata-rata

TPT lima provinsi yang dianalisis, seluruh provinsi memiliki angka yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, kecuali Papua Barat yang sedikit lebih tinggi.

Rata-rata TPT tertinggi selama periode tersebut tercatat di Provinsi Banten sebesar 8,92%, diikuti oleh Jawa Barat (8,58%), Kepulauan Riau (7,70%), dan DKI Jakarta (7,63%). Sementara itu, Papua Barat mencatat rata-rata TPT terendah sebesar 6,19%, yang hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Secara umum, periode 2013–2019 menunjukkan tren penurunan angka pengangguran di hampir seluruh provinsi. Penurunan paling signifikan terjadi di DKI Jakarta, dari 8,63% pada tahun 2013 menjadi 6,54% pada tahun 2019. Hal ini mencerminkan kondisi ketenagakerjaan yang cenderung membaik sebelum terjadinya pandemi COVID-19.

Namun, pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan lonjakan angka pengangguran di seluruh provinsi. DKI Jakarta mencatat peningkatan paling tajam hingga mencapai 10,95%, diikuti oleh Banten (10,64%), Jawa Barat (10,46%), dan Kepulauan Riau (10,34%). Papua Barat menjadi satu-satunya provinsi yang mengalami peningkatan yang relatif lebih kecil, yaitu sebesar 6,80%. Pada periode 2021–2023, terlihat adanya proses pemulihan yang bervariasi di masing-masing provinsi. DKI Jakarta dan Banten menunjukkan pemulihan yang cukup cepat, sedangkan Kepulauan Riau mengalami penurunan TPT yang lebih lambat. Papua Barat justru mencatat penurunan yang konsisten, dengan TPT terendah sebesar 5,53% pada tahun 2023.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan sekitarnya lebih rentan terhadap gejolak ekonomi, seperti yang terjadi pada masa pandemi, namun juga memiliki kapasitas pemulihan yang relatif lebih tinggi. Sebaliknya, Papua Barat menunjukkan tingkat ketahanan yang lebih kuat terhadap guncangan eksternal, yang kemungkinan disebabkan oleh perbedaan struktur ekonomi dan karakteristik pasar tenaga kerja di wilayah tersebut.

4.4 Kondisi Pertumbuhan Ekonomi di Lima Provinsi

Untuk menggambarkan kondisi pertumbuhan ekonomi di lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi, digunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dalam satuan miliar rupiah. Data

berikut menyajikan nilai PDRB tahunan masing-masing provinsi selama periode 2013 hingga 2023, yang mencerminkan perkembangan aktivitas ekonomi di setiap wilayah. Dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel 4. 4 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Lima Provinsi 2013-2023.

Tahun	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)				
	DKI Jakarta	Banten	Kep. Riau	Jawa Barat	Papua Barat
2013	1,296,695	3,310,991	1,372,639	1,093,544	4,769,423
2014	1,373,389	3,493,512	1,463,252	1,149,216	5,025,991
2015	1,454,564	3,683,772	1,551,314	1,207,232	5,234,649
2016	1,539,917	3,878,351	162,853	1,275,619	5,471,128
2017	1,635,359	410,137	1,660,817	1,343,662	5,690,796
2018	1,735,208	4,337,827	1,734,988	1,419,624	6,046,552
2019	1,836,241	456,620	1,818,777	1,490,960	6,207,452
2020	1,792,291	4,411,486	1,749,592	1,453,381	6,160,413
2021	1,856,001	4,609,528	1,809,524	1,507,746	612,894
2022	1,953,489	4,841,312	1,901,637	1,589,985	6,251,853
2023	2,050,466	5,074,272	2,000,439	1,669,417	4,095,486
Rata-rata	1,684,875	3,500,710	1,568,621	1,381,853	5,506,058

Sumber: Data Pusat Statistik (Data Diolah)

Pertumbuhan ekonomi di lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi dilihat berdasarkan perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku selama periode 2013–2023 dalam satuan miliar rupiah. Secara umum, seluruh provinsi menunjukkan tren peningkatan nilai PDRB, meskipun dengan kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda.

Provinsi DKI Jakarta mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil dan signifikan. Nilai PDRB meningkat dari 1.296.695 miliar rupiah pada tahun 2013 menjadi 2.050.466 miliar rupiah pada tahun 2023, dengan rata-rata sebesar 1.684.875 miliar rupiah. Capaian ini mencerminkan peran penting DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional.

Provinsi Banten juga menunjukkan tren pertumbuhan positif. PDRB meningkat dari 3.310.991 miliar rupiah pada tahun 2013 menjadi 5.074.272 miliar rupiah pada tahun 2023, dengan rata-rata sebesar 3.500.710 miliar rupiah. Namun,

terdapat anomali data pada tahun 2017 dan 2019 yang menunjukkan angka sangat rendah dibandingkan tren tahunan lainnya, sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap keakuratan data tersebut.

Kepulauan Riau mengalami peningkatan nilai PDRB dari 1.372.639 miliar rupiah pada tahun 2013 menjadi 2.000.439 miliar rupiah pada tahun 2023, dengan rata-rata sebesar 1.568.621 miliar rupiah. Pertumbuhan ini relatif stabil, mencerminkan berlanjutnya aktivitas ekonomi di sektor industri dan kelautan.

Provinsi Jawa Barat mencatat pertumbuhan PDRB dari 1.093.544 miliar rupiah pada tahun 2013 menjadi 1.669.417 miliar rupiah pada tahun 2023, dengan rata-rata sebesar 1.381.853 miliar rupiah. Pertumbuhan ini didukung oleh dominasi sektor manufaktur, perdagangan, dan jasa sebagai penggerak utama ekonomi daerah.

Sementara itu, Papua Barat menunjukkan tren PDRB yang tinggi namun fluktuatif. Pada tahun 2013, nilai PDRB tercatat sebesar 4.769.423 miliar rupiah, dan mengalami peningkatan hingga mencapai 6.251.853 miliar rupiah pada tahun 2022, sebelum menurun menjadi 4.095.486 miliar rupiah pada tahun 2023. Secara rata-rata, PDRB Papua Barat selama periode ini sebesar 5.506.058 miliar rupiah, tertinggi di antara lima provinsi lainnya. Besarnya nilai ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dominasi sektor pertambangan dan migas dalam struktur ekonomi provinsi tersebut.

Sebagai pembanding, rata-rata PDRB nasional pada periode yang sama tercatat sebesar 2.652.000 miliar rupiah. Jika dibandingkan, hanya Papua Barat dan Banten yang memiliki nilai rata-rata PDRB di atas rata-rata nasional. Sementara itu, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Jawa Barat memiliki rata-rata PDRB di bawah angka nasional. Perbedaan ini mengindikasikan adanya variasi struktur ekonomi antardaerah, di mana provinsi dengan basis ekonomi padat modal seperti industri besar dan tambang memiliki nilai PDRB lebih tinggi dibanding provinsi dengan basis ekonomi padat karya.

4.5 Kondisi Tingkat Upah di Lima Provinsi

Salah satu indikator penting dalam menganalisis kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja adalah besaran upah minimum provinsi (UMP). UMP mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dalam menetapkan batas minimum upah yang harus dibayarkan kepada tenaga kerja formal, sesuai dengan kebutuhan hidup layak di masing-masing wilayah. Tabel berikut menyajikan perkembangan UMP di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan Papua Barat selama periode 2013 hingga 2023.

Tabel 4. 5 Tingkat Upah (UMP) di Lima Provinsi

Tahun	Upah Minimum Provinsi (Juta Rupiah)				
	Kep. Riau	DKI Jakarta	Jawa Barat	Banten	Papua Barat
2013	1.365.087	2.200.000	850.000	1.170.000	1.720.000
2014	1.665.000	2.441.000	1.000.000	1.325.000	1.870.000
2015	1.954.000	2.700.000	1.000.000	1.600.000	2.015.000
2016	2.178.710	3.100.000	2.250.000	1.784.000	2.237.000
2018	2.563.875	3.648.036	1.544.361	2.099.385	2.667.000
2019	2.769.754	3.940.973	1.668.373	2.267.990	2.934.500
2020	3.005.460	4.276.350	1.810.351	2.460.997	3.134.600
2021	3.005.460	4.416.186	1.810.351	2.460.996	3.134.600
2022	3.050.172	4.641.854	1.841.487	2.501.203	3.200.000
2023	3.279.194	4.901.798	1.986.670	2.661.280	3.282.000
Rata-rata	2.487.071	3.926.820	1.676.819	2.233.086	2.689.070

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Upah Minimum Provinsi (UMP) menggambarkan tingkat kesejahteraan minimum yang dijamin oleh pemerintah kepada tenaga kerja formal. Peningkatan upah dari tahun ke tahun menunjukkan adanya dorongan terhadap daya beli dan perlindungan pendapatan pekerja. Tabel berikut menyajikan perkembangan UMP di lima provinsi terpilih selama periode 2013 hingga 2023, yang diukur dalam satuan rupiah.

Provinsi DKI Jakarta mencatat nilai UMP tertinggi secara konsisten selama periode penelitian. UMP meningkat dari Rp2.200.000 pada tahun 2013 menjadi Rp4.901.798 pada tahun 2023, dengan rata-rata sebesar Rp3.926.820. Kenaikan ini

mencerminkan biaya hidup yang tinggi di ibu kota sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan hidup layak.

Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren pertumbuhan UMP yang stabil, dari Rp1.365.087 pada tahun 2013 menjadi Rp3.279.194 pada tahun 2023. Rata-rata UMP provinsi ini sebesar Rp2.487.071, menunjukkan penyesuaian bertahap terhadap inflasi dan kebutuhan ekonomi wilayah industri dan kepelabuhanan.

Papua Barat memiliki rata-rata UMP tertinggi kedua setelah DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp2.689.070, dengan tren kenaikan dari Rp1.720.000 (2013) menjadi Rp3.282.000 (2023). Kenaikan UMP di Papua Barat kemungkinan besar disesuaikan dengan tingginya biaya logistik dan distribusi barang di wilayah timur Indonesia.

Provinsi Banten mencatat peningkatan UMP dari Rp1.170.000 pada tahun 2013 menjadi Rp2.661.280 pada tahun 2023, dengan rata-rata Rp2.233.086. Meskipun kenaikannya tergolong stabil, rata-rata UMP di Banten masih berada di bawah nilai nasional.

Jawa Barat memiliki rata-rata UMP terendah, yaitu sebesar Rp1.676.819 selama periode 2013–2023. Meskipun UMP meningkat dari Rp850.000 pada tahun 2013 menjadi Rp1.986.670 pada tahun 2023, tingkat kenaikan ini masih lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya, mencerminkan tekanan pada upah minimum di wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.

Sebagai pembanding, rata-rata UMP nasional selama periode 2013–2023 adalah sekitar Rp2.362.000. Dari perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa hanya DKI Jakarta, Papua Barat, dan Kepulauan Riau yang memiliki rata-rata UMP di atas nilai nasional, sedangkan Banten dan Jawa Barat masih berada di bawah. Perbedaan ini mencerminkan variasi biaya hidup, struktur ekonomi, serta kekuatan pasar tenaga kerja di masing-masing provinsi.

4.6 Kondisi Tingkat Inflasi di Lima Provinsi

Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang menggambarkan tingkat perubahan harga barang dan jasa dalam suatu wilayah. Tingkat inflasi yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, sementara inflasi yang terlalu rendah dapat menandakan lemahnya permintaan

dalam perekonomian. Oleh karena itu, pemantauan inflasi penting untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah. Tabel berikut menyajikan tingkat inflasi tahunan di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan Papua Barat, selama periode 2013 hingga 2023.

Tabel 4. 6 Inflasi di Lima Provinsi 2013-2023

Tahun	Inflasi (Persen)				
	DKI Jakarta	Banten	Kep. Riau	Jawa Barat	Papua Barat
2013	8.00	9.65	8.24	9.15	6.72
2014	2.46	10.20	7.59	7.60	8.36
2015	3.30	4.29	4.40	2.73	3.35
2016	2.37	2.94	3.53	2.75	3.02
2017	3.72	3.98	4.02	3.63	3.61
2018	3.27	3.42	3.47	3.54	3.13
2019	3.23	3.30	2.03	3.21	2.72
2020	1.59	1.45	1.18	2.18	1.68
2021	1.53	1.91	2.26	1.69	2.06
2022	4.21	5.08	5.83	6.04	4.40
2023	2.08	2.04	2.76	2.48	4.40
Rata-rata	3.36	5.02	4.26	4.18	3.86

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Berdasarkan data inflasi selama periode 2013–2023, terlihat bahwa tingkat inflasi di lima provinsi mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, terutama pada tahun-tahun awal dan menjelang masa pandemi.

Provinsi Banten mencatat rata-rata inflasi tertinggi selama periode tersebut, yaitu sebesar 5,02%, dengan inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 10,20%. Hal ini menunjukkan bahwa Banten relatif lebih rentan terhadap tekanan harga dibanding provinsi lainnya.

Kepulauan Riau menempati urutan kedua dengan rata-rata inflasi sebesar 4,26%. Provinsi ini menunjukkan tingkat inflasi yang tinggi terutama pada awal periode, tetapi cenderung lebih stabil setelah tahun 2016.

Jawa Barat mencatat rata-rata inflasi sebesar 4,18%, yang juga cukup tinggi pada tahun-tahun awal, terutama tahun 2013 dan 2014, tetapi menurun secara signifikan selama pandemi sebelum kembali naik pada tahun 2022.

Papua Barat memiliki rata-rata inflasi sebesar 3,86%. Meskipun nilainya tidak setinggi provinsi lain, Papua Barat mencatat tren inflasi yang cenderung stabil sepanjang periode, tanpa lonjakan ekstrem.

Sementara itu, DKI Jakarta menunjukkan rata-rata inflasi terendah, yaitu sebesar 3,36%. Angka ini mencerminkan kestabilan harga yang lebih terjaga di ibu kota, meskipun inflasi sempat melonjak tinggi pada tahun 2013 sebesar 8,00%.

Sebagai pembandingan, rata-rata inflasi nasional selama periode 2013–2023 adalah sekitar 3,53%. Jika dibandingkan, hanya DKI Jakarta dan Papua Barat yang memiliki rata-rata inflasi di bawah angka nasional, sementara Banten, Kepulauan Riau, dan Jawa Barat mencatat angka di atas rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas harga di beberapa provinsi masih menjadi tantangan, terutama di wilayah-wilayah dengan dinamika pasokan barang dan jasa yang lebih tinggi.

4.7 Kondisi Tingkat Pendidikan di Lima Provinsi

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas di suatu wilayah. Semakin tinggi angka ini, maka semakin besar pula akses masyarakat terhadap pendidikan formal. Indikator ini penting untuk melihat kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Tabel berikut menyajikan perkembangan rata-rata lama sekolah di lima provinsi terpilih, yaitu DKI Jakarta, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan Papua Barat, selama periode 2013 hingga 2023.

Selama periode 2013–2023, rata-rata lama sekolah di seluruh provinsi mengalami peningkatan, meskipun dengan kecepatan yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan akses dan pemerataan pendidikan di tingkat provinsi, walaupun kesenjangan antardaerah masih terlihat cukup jelas.

Adapun rincian kondisinya sebagaimana tergambar pada tabel 4.6.

Tabel 4. 7 Tingkat Pendidikan di Lima Provinsi 2013-2023

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)				
	Kep. Riau	DKI Jakarta	Jawa Barat	Banten	Papua Barat
2013	9.63	10.47	7.58	8.17	6.91
2014	9.64	10.54	7.71	8.19	6.96
2015	9.65	10.70	7.86	8.27	7.01
2016	9.67	10.88	7.95	8.37	7.06
2017	9.79	11.02	8.14	8.53	7.15
2018	9.81	11.05	8.15	8.62	7.27
2019	9.99	11.06	8.37	8.74	7.44
2020	10.12	11.13	8.55	8.89	7.60
2021	10.18	11.17	8.61	8.93	7.69
2022	10.37	11.31	8.78	9.13	7.84
2023	10.41	11.45	8.83	9.15	7.93
Rata-rata	9.91	11.00	8.18	8.66	7.32

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

DKI Jakarta mencatat rata-rata lama sekolah tertinggi, yaitu 11,00 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia 25 tahun ke atas di DKI Jakarta telah menempuh pendidikan hingga tingkat menengah atas, bahkan sebagian mencapai perguruan tinggi. Sejak tahun 2013, angka ini terus meningkat dari 10,47 tahun hingga 11,45 tahun pada 2023, mencerminkan tingginya partisipasi pendidikan formal di ibu kota.

Kepulauan Riau berada di urutan kedua dengan rata-rata lama sekolah sebesar 9,91 tahun. Angka ini relatif tinggi dan menunjukkan bahwa mayoritas penduduk provinsi tersebut setidaknya telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP dan sebagian besar hingga SMA. Peningkatan terjadi secara konsisten setiap tahun.

Provinsi Banten mencatat rata-rata sebesar 8,66 tahun, yang juga menunjukkan tren peningkatan dari 8,17 tahun pada 2013 menjadi 9,15 tahun pada 2023. Meskipun tidak setinggi Kepulauan Riau, peningkatan ini menunjukkan perkembangan positif dalam akses pendidikan di provinsi tersebut.

Jawa Barat, dengan rata-rata 8,18 tahun, masih berada di bawah DKI Jakarta dan provinsi sekitarnya. Meskipun menunjukkan tren peningkatan dari 7,58 tahun pada 2013 menjadi 8,83 tahun pada 2023, nilai ini mencerminkan tantangan dalam hal pemerataan pendidikan di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.

Sementara itu, Papua Barat memiliki rata-rata lama sekolah terendah, yaitu 7,32 tahun. Meskipun angka ini meningkat dari 6,91 tahun pada 2013 menjadi 7,93 tahun pada 2023, gap yang cukup besar dibandingkan provinsi lain menunjukkan masih terbatasnya akses pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil di wilayah timur Indonesia.

Sebagai pembanding, rata-rata nasional rata-rata lama sekolah pada periode yang sama berada di kisaran 8,7 tahun. Dari data tersebut, hanya DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Banten yang memiliki rata-rata di atas nasional, sementara Jawa Barat dan Papua Barat masih berada di bawah. Perbedaan ini mencerminkan kesenjangan pembangunan pendidikan yang perlu terus diupayakan perbaikannya oleh pemerintah daerah dan pusat.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Perkembangan Variabel Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, dilakukan analisis statistik deskriptif terhadap variabel-variabel seperti pertumbuhan ekonomi (PDRB), tingkat upah minimum (UMP), inflasi, dan tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah) di lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia selama periode 2013–2023. Analisis ini bertujuan untuk melihat perkembangan setiap variabel dari tahun ke tahun dan seberapa besar pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran.

5.1.1 Perkembangan Tingkat Pengangguran

Pengangguran adalah salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi. (Menurut Nanga, 2005:249), pengangguran terjadi ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. (Putong, 2009:256) juga menjelaskan bahwa pengangguran muncul karena jumlah tenaga kerja yang tersedia tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang ada. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, karena angkatan kerja yang tidak produktif tidak berkontribusi pada perekonomian.

Dalam penelitian ini, tingkat pengangguran dianalisis pada lima provinsi yang berperan penting dalam perekonomian nasional, yaitu DKI Jakarta, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan Papua Barat, selama periode 2013 hingga 2023. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan perkembangan tingkat pengangguran terbuka di kelima provinsi tersebut selama periode tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional pada periode 2013–2023 berada pada kisaran 5,28% hingga 7,07%. Adapun perkembangan TPT di lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi menunjukkan pola yang beragam sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2013 hingga 2019, hampir seluruh provinsi mengalami tren penurunan angka pengangguran. Provinsi DKI Jakarta mencatat penurunan paling signifikan, dari

8,39% pada tahun 2013 menjadi 5,00% pada tahun 2019. Kondisi ini mencerminkan perbaikan situasi ketenagakerjaan sebelum terjadinya pandemi COVID-19.

Namun demikian, pada tahun 2020, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi ketenagakerjaan. Hampir seluruh provinsi mengalami lonjakan angka pengangguran yang tajam. DKI Jakarta mencatat peningkatan tertinggi hingga mencapai 10,95%, diikuti oleh Banten (10,64%), Jawa Barat (10,46%), dan Kepulauan Riau (10,12%). Sementara itu, Papua Barat menjadi satu-satunya provinsi yang hanya mengalami peningkatan relatif kecil, yaitu sebesar 6,88%.

Memasuki periode pemulihan pascapandemi, mulai tahun 2021 hingga 2023, setiap provinsi menunjukkan laju pemulihan yang berbeda-beda. DKI Jakarta dan Banten mampu menurunkan angka pengangguran dengan cukup cepat, sedangkan Kepulauan Riau mengalami proses pemulihan yang lebih lambat. Di sisi lain, Papua Barat menunjukkan tren penurunan yang konsisten dan mencatat angka pengangguran terendah sebesar 5,10% pada tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, Banten memiliki rata-rata TPT tertinggi selama periode penelitian, yakni sebesar 8,75%, disusul oleh Jawa Barat (8,55%), Kepulauan Riau (8,32%), DKI Jakarta (7,50%), dan Papua Barat dengan rata-rata terendah sebesar 7,22%.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Papua Barat memiliki tingkat ketahanan yang lebih baik terhadap tekanan krisis ekonomi dibandingkan provinsi lainnya. Sementara itu, provinsi-provinsi di wilayah Jawa dan sekitarnya cenderung lebih rentan terhadap krisis, namun menunjukkan kemampuan pemulihan yang relatif lebih cepat. Perbedaan ini kemungkinan besar disebabkan oleh variasi dalam struktur ekonomi dan karakteristik pasar tenaga kerja di masing-masing provinsi. Adapun rincian Perkembangannya sebagaimana tergambar pada Tabel 5.1.1.

Tabel 5.1.1 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Lima Provinsi Tahun 2013-2023 (%)

Tahun	DKI Jakarta	Banten	Kep. Riau	Jawa Barat	Papua Barat
2013	8,39	9,78	9,95	8,37	9,33
2014	8,47	9,49	9,57	8,40	8,91
2015	6,73	8,64	7,71	8,89	9,28
2016	5,62	7,92	6,74	8,89	8,38
2017	6,08	8,52	6,61	8,22	7,58
2018	5,16	8,52	6,33	7,73	6,44
2019	5,00	8,11	6,21	7,82	5,82
2020	10,95	10,64	10,12	10,46	6,88
2021	10,48	9,86	9,91	9,82	6,14
2022	8,42	8,09	9,42	8,31	5,63
2023	7,87	7,72	8,98	7,57	5,10
Rata-rata	7,50	8,75	8,32	8,55	7,22

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023, (Data Diolah)

5.1.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama untuk melihat kinerja perekonomian di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan peningkatan kemampuan daerah dalam memproduksi barang dan jasa selama periode tertentu. Secara teori, pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai tanda keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Todaro & Smith, 2012). Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah, digunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi (PDRB) di lima provinsi selama tahun 2013-2023 menunjukkan trend yang berbeda-beda, terutama setelah adanya dampak besar dari pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Di Provinsi DKI Jakarta, pertumbuhan ekonomi berlangsung stabil hingga tahun 2019, lalu mengalami penurunan sebesar -4,39% pada tahun 2020. Meskipun demikian, perekonomian Jakarta pulih dengan cepat, ditandai oleh pertumbuhan 4,92% pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 5,21% pada 2023. Pemulihan ini menunjukkan kekuatan

ekonomi Jakarta yang didukung oleh inflasi yang terkendali serta perkembangan sektor industri dan perdagangan. Adapun rincian Perkembangannya sebagaimana tergambar pada Tabel 5.1.2.

Tabel 5.1.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Di Lima Provinsi Tahun 2013-2023 (%)

PDRB (Milyar Rupiah)					
Tahun	DKI Jakarta	Banten	Kep. Riau	Jawa Barat	Papua Barat
2013	5.26	8.23	11.00	6.55	14.15
2014	5.20	5.03	2.62	5.68	7.66
2015	5.61	5.01	2.57	5.97	4.69
2016	5.15	4.92	2.18	5.77	3.51
2017	5.68	5.72	3.52	6.45	3.74
2018	5.85	6.09	3.78	6.99	5.74
2019	5.73	6.15	4.01	6.32	4.03
2020	-4.39	-4.67	-4.53	-4.54	-1.89
2021	4.92	6.37	4.62	7.34	2.31
2022	5.56	6.98	6.25	6.99	5.17
2023	5.21	6.62	6.37	6.57	5.44
Rata-Rata	4,53	5,13	3,85	5,46	4,96

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Perkembangan pertumbuhan ekonomi (PDRB) di lima provinsi selama tahun 2013-2023 menunjukkan trend yang berbeda-beda, terutama setelah adanya dampak besar dari pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Di Provinsi DKI Jakarta, pertumbuhan ekonomi berlangsung stabil hingga tahun 2019, lalu mengalami penurunan sebesar -4,39% pada tahun 2020. Meskipun demikian, perekonomian Jakarta pulih dengan cepat, ditandai oleh pertumbuhan 4,92% pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 5,21% pada 2023. Pemulihan ini menunjukkan kekuatan ekonomi Jakarta yang didukung oleh inflasi yang terkendali serta perkembangan sektor industri dan perdagangan.

Provinsi Banten juga mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar -4,67%, kemudian, pertumbuhan kembali meningkat pada 2021 6,37% dan 6,62% pada 2023. Pemulihan ini didorong oleh peningkatan investasi asing serta pertumbuhan

di sektor manufaktur dan ekspor. Kepulauan Riau, yang sempat turun -4,53% pada 2020, mencatat pemulihan bertahap dengan pertumbuhan sebesar 4,62% pada 2021 dan 6,37% pada 2023. Pemulihan di daerah ini berjalan lebih lambat karena sektor pariwisata yang terdampak cukup besar, meskipun sektor industri mulai berkembang kembali.

Jawa Barat sebagai provinsi dengan populasi besar mengalami penurunan ekonomi sebesar -4,54% pada 2020. Namun, pemulihan berlangsung cukup cepat, yaitu 7,34% pada 2021 dan 6,57% pada 2023. Pemulihan ini dipengaruhi oleh aktivitas sektor industri dan meningkatnya kesempatan kerja, meskipun masalah pengangguran masih menjadi tantangan. Sementara itu, Papua Barat mencatat penurunan ekonomi paling kecil pada 2020 sebesar -1,89%. Pertumbuhan di tahun-tahun berikutnya yaitu 2,31% (2021) dan 5,44% (2023) menunjukkan Pemulihan berlangsung lebih lambat, antara lain karena rendahnya nilai investasi dan tingginya ketergantungan pada sektor sumber daya alam.

Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 4,79%, dapat dilihat bahwa hanya Jawa Barat, Banten, dan Papua Barat yang pertumbuhan ekonominya berada di atas rata-rata nasional. DKI Jakarta dan Kepulauan Riau mencatat angka di bawah rata-rata nasional. Penurunan signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 terlihat berdampak besar di semua provinsi, terutama DKI Jakarta dan Kepulauan Riau yang mengalami kontraksi ekonomi cukup dalam. Namun, pada tahun-tahun setelahnya, sebagian besar provinsi mampu menunjukkan pemulihan yang konsisten, meskipun dengan kecepatan yang berbeda-beda. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi dan ketahanan regional memiliki peran penting dalam menghadapi krisis ekonomi nasional.

5.1.3 Perkembangan Tingkat Upah

Upah memiliki peran penting dalam perekonomian karena menjadi sumber utama pendapatan bagi sebagian besar rumah tangga dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Menurut (Mankiw, 2006), upah merupakan imbalan yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja atas jasa yang telah diberikan dalam kegiatan produksi. Upah Minimum Provinsi (UMP) terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, yang berfungsi sebagai perlindungan agar pekerja tidak menerima

upah di bawah standar. Penetapan UMP secara umum mempertimbangkan beberapa hal, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, produktivitas, dan kebutuhan hidup layak.

Berikut adalah perkembangan UMP lima provinsi selama tahun 2013–2023 yang telah dikonversi ke dalam satuan juta rupiah per bulan.

Tabel 5.1.3 Perkembangan Upah Minimum Provinsi Tahun 2013–2023 (%)

Upah Minimum Provinsi (Rupiah)					
Tahun	DKI Jakarta	Banten	Kep. Riau	Jawa Barat	Papua Barat
2013	43.79	23.08	15.17	78.21	17.93
2014	10.91	3.91	11.98	10.07	11.11
2015	10.66	20.30	10.70	30.72	6.32
2016	14.81	9.38	11.11	12.50	13.86
2017	8.39	10.29	2.61	2.22	5.22
2018	8.63	8.81	8.47	7.83	0.83
2019	7.95	8.10	8.20	7.66	8.61
2020	8.63	8.37	7.94	4.87	10.57
2021	3.27	0.00	0.67	0.36	6.83
2022	4.98	4.07	1.33	1.42	2.24
2023	5.60	3.91	7.54	2.46	2.50
Rata-Rata	11,73	9,74	7,79	14,47	7,90

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Perkembangan Upah Minimum Provinsi (UMP) menunjukkan trend yang terus meningkat, meskipun tingkat kenaikannya tidak sama di setiap provinsi. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2013, dengan Jawa Barat mengalami kenaikan sebesar 78,21% dan DKI Jakarta sebesar 43,79%. Kedua provinsi ini memiliki angka rata-rata di atas rata-rata nasional yang berada pada 10,34%, mencerminkan dorongan kuat untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di tengah kebutuhan hidup yang tinggi di wilayah padat penduduk dan industri.

Pada tahun 2013-2019, seluruh provinsi secara umum mengalami kenaikan UMP yang stabil, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan antara 2% hingga 15%. Kondisi ini menunjukkan adanya penyesuaian yang berkelanjutan terhadap

perubahan ekonomi dan inflasi. Namun, pada tahun 2021 terjadi perlambatan kenaikan upah, yang terlihat dari tidak naiknya UMP di Provinsi Banten dan rendahnya kenaikan di provinsi lainnya. Hal ini berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kemampuan keuangan daerah dan kinerja sektor usaha.

Pemulihan mulai terlihat pada tahun 2022 dan 2023, ditandai dengan kenaikan UMP di seluruh provinsi. Papua Barat, yang memiliki kondisi geografis dan sosial ekonomi yang berbeda dibandingkan wilayah lain, juga menunjukkan kenaikan UMP yang cukup stabil setiap tahunnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 10,57%, yang menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi.

Secara keseluruhan, kenaikan UMP di lima provinsi ini menunjukkan adanya kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan tenaga kerja serta sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Perkembangan UMP juga menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan standar hidup yang layak bagi para pekerja.

5.1.4 Perkembangan Inflasi

Inflasi adalah salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu periode. Inflasi berpengaruh besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat karena dapat memengaruhi daya beli, pola konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi yang stabil mencerminkan kondisi ekonomi yang baik, sedangkan inflasi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mengganggu kestabilan ekonomi dan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, inflasi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah (Sukirno, 2014).

Berikut perkembangan tingkat inflasi selama tahun 2013–2023 di lima provinsi tersebut.

Tabel 5.1.4 Perkembangan Tingkat Inflasi di Lima Provinsi Tahun 2013–2023 (%)

Tahun	Inflasi (Persen)				
	DKI Jakarta	Banten	Kep. Riau	Jawa Barat	Papua Barat
2013	8.00	9.65	8.24	9.15	6.72
2014	2.46	10.20	7.59	7.60	8.36
2015	3.30	4.29	4.40	2.73	3.35
2016	2.37	2.94	3.53	2.75	3.02
2017	3.72	3.98	4.02	3.63	3.61
2018	3.27	3.42	3.47	3.54	3.13
2019	3.23	3.30	2.03	3.21	2.72
2020	1.59	1.45	1.18	2.18	1.68
2021	1.53	1.91	2.26	1.69	2.06
2022	4.21	5.08	5.83	6.04	4.40
2023	2.08	2.04	2.76	2.48	4.40
Rata-rata	3.36	5.02	4.26	4.18	3.86

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Tingkat inflasi di lima provinsi menunjukkan tren yang bervariasi selama periode 2013–2023. Secara umum, semua provinsi mengalami kenaikan inflasi pada tahun 2013 dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak bersubsidi, yang berdampak pada naiknya harga barang dan jasa di seluruh wilayah.

Selama periode 2013–2023, tingkat inflasi di lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Perbedaan angka inflasi antardaerah mencerminkan beragamnya dinamika ekonomi regional, seperti tingkat konsumsi, distribusi barang dan jasa, serta efisiensi kebijakan pengendalian harga oleh pemerintah daerah.

Banten mencatat rata-rata inflasi tertinggi, yaitu sebesar 5,02%, yang menunjukkan tekanan harga yang relatif tinggi selama periode tersebut. Angka ini secara konsisten berada di atas rata-rata nasional dan provinsi lainnya, terutama

pada tahun 2013 dan 2014 yang mencatat inflasi sangat tinggi masing-masing sebesar 9,65% dan 10,20%.

Kepulauan Riau mencatat rata-rata inflasi sebesar 4,26%, diikuti Jawa Barat sebesar 4,18%, dan Papua Barat sebesar 3,86%. DKI Jakarta memiliki rata-rata inflasi terendah, yaitu 3,36%, yang menunjukkan pengendalian harga yang relatif lebih stabil, meskipun provinsi ini merupakan pusat konsumsi nasional. Rendahnya inflasi di Jakarta juga mencerminkan efektivitas distribusi barang, efisiensi transportasi, serta pengaruh struktur pasar modern yang lebih dominan.

Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional selama periode tersebut yang sebesar 4,14%, maka hanya Banten dan Kepulauan Riau yang mencatat rata-rata inflasi di atas nasional. Sementara DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Papua Barat berada di bawah. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi di sebagian besar provinsi dalam penelitian ini masih dapat dikendalikan, meskipun tetap perlu perhatian dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok, khususnya di provinsi-provinsi dengan daya beli rendah.

5.1.5 Perkembangan Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu indikator penting dalam membangun sumber daya manusia. Tingkat pendidikan di suatu daerah menunjukkan kualitas tenaga kerja yang tersedia, yang nantinya akan memengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi saat ini, peningkatan kualitas pendidikan menjadi hal yang utama karena pendidikan memengaruhi kemampuan masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi dan bersaing di pasar kerja global (Todaro & Smith, 2012). Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun pendidikan yang sudah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Semakin tinggi angka ini, maka semakin baik pula tingkat pendidikan masyarakat di daerah tersebut.

Berikut perkembangan Tingkat Pendidikan (rata-rata lama sekolah) tahun 2013-2023.

Tabel 5.1.5 Perkembangan Tingkat Pendidikan (RLS) Lima Provinsi Tahun 2013–2023 (%)

Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)					
Tahun	DKI Jakarta	Banten	Kep. Riau	Jawa Barat	Papua Barat
2013	-0.52	-0.59	-0.28	-0.67	-1.13
2014	0.22	0.19	0.02	0.16	0.07
2015	0.05	0.05	0.00	0.08	0.12
2016	0.05	0.07	0.09	0.07	0.09
2017	0.10	0.10	0.13	0.10	0.04
2018	0.04	0.11	0.02	0.07	0.06
2019	0.10	0.10	0.02	0.06	0.03
2020	0.02	0.10	0.03	0.04	0.07
2021	0.04	0.09	0.03	0.05	0.02
2022	0.09	0.10	0.04	0.05	0.04
2023	0.05	0.09	0.05	0.04	0.03
Rata-Rata	0,022	0,037	0,014	0,005	-0,051

Sumber: Badan Pusat Statistik, (Data Diolah)

Perkembangan tingkat pendidikan yang diukur melalui indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan di seluruh provinsi yang diteliti. Secara umum, pada tahun 2013-2023, kelima provinsi mengalami peningkatan yang stabil setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan yang relatif konsisten.

Selama periode 2013 hingga 2023, perkembangan rata-rata lama sekolah di lima provinsi menunjukkan tren yang bervariasi. Secara umum, semua provinsi mengalami pertumbuhan positif meskipun dengan kecepatan yang sangat kecil. Hal ini mencerminkan bahwa peningkatan lama sekolah berlangsung secara bertahap dan masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, terutama di wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan.

Banten mencatat rata-rata pertumbuhan tertinggi sebesar 0,037 tahun per tahun, disusul oleh DKI Jakarta sebesar 0,022 tahun. Ini menunjukkan bahwa kedua provinsi tersebut memiliki dorongan yang relatif lebih kuat dalam mendorong peningkatan capaian pendidikan penduduknya.

Kepulauan Riau dan Jawa Barat masing-masing mencatat rata-rata pertumbuhan sebesar 0,014 tahun dan 0,005 tahun, yang menunjukkan perkembangan yang lebih lambat, meskipun tetap berada di jalur positif. Keempat provinsi ini, walaupun angkanya kecil, setidaknya mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan setiap tahun.

Berbeda halnya dengan Papua Barat, yang mencatat rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -0,051 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa provinsi tersebut sempat mengalami penurunan rata-rata lama sekolah di awal periode pengamatan, yang baru mulai membaik setelah tahun 2014. Rendahnya pertumbuhan ini dapat disebabkan oleh masih terbatasnya infrastruktur pendidikan serta tantangan geografis di wilayah timur Indonesia.

Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berada di kisaran 0,017 tahun per tahun, maka Banten dan DKI Jakarta memiliki pertumbuhan di atas nasional, sedangkan Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan Papua Barat berada di bawah. Fakta ini memperlihatkan bahwa ketimpangan dalam perkembangan pendidikan antardaerah masih nyata, dan perlu adanya intervensi khusus dari pemerintah pusat untuk mempercepat pemerataan akses dan kualitas pendidikan, terutama di wilayah luar Jawa.

5.2 Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Upah, Inflasi, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran di Lima Provinsi

5.2.1 Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel yang merupakan gabungan dari data cross section lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia dan data time series dari tahun 2013 hingga 2023. Total data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 55 observasi. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat upah, inflasi, dan tingkat pendidikan terhadap variabel dependen yaitu tingkat pengangguran. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)

dan sumber resmi lainnya yang relevan. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan software EViews 12 dengan metode regresi data panel.

Untuk melakukan uji regresi data panel, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangannya. Pemilihan model yang tepat bergantung pada asumsi yang digunakan peneliti serta kesesuaian dengan syarat-syarat pengolahan data statistik yang benar, agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menentukan model terbaik di antara ketiga pendekatan tersebut. Pengujian statistik untuk memilih model pertama kali adalah dengan melakukan uji chow untuk menentukan apakah metode Pooled Least Square atau Fixed Effect yang sebaiknya digunakan dalam membuat regresi data panel dan yang kedua dengan menggunakan Uji Hausman untuk menentukan apakah metode Fixed Effect atau Random Effect yang sebaiknya digunakan dalam membuat regresi data panel.

5.2.2 Pemilihan Model

5.2.2.1 Hasil Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk mengetahui apakah metode Common Effect Model (CEM) atau Fixed Effect Model (FEM) yang akan dipilih untuk mengestimasi data. Kriteria pengambilan keputusan pada uji chow yaitu, jika Prob. Cross section Chi Square $< \alpha$ (5%) maka Fixed Effect Model yang dipilih, atau jika Prob Cross-Section Chi Square $> \alpha$ (5%) maka Common Effect Model yang dipilih.

Tabel 5.2.2.1 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.640119	(4,46)	0.0001
Cross-section Chi-square	28.019175	4	0.0000

Sumber : Hasil olah data eviews 12.

Berdasarkan hasil uji Chow, diketahui bahwa nilai Probabilitas Cross-section F sebesar 0.0001 dan Probabilitas Cross-section Chi-square sebesar 0.0000, yang keduanya $< \alpha$ (5%) berarti nilai p-value $< (0,05)$. Dengan demikian, model yang tepat untuk digunakan adalah Fixed Effect Model.

5.2.2.2 Hasil Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk mengetahui apakah Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM) yang akan dipilih untuk mengestimasi data. Kriteria pengambilan keputusan pada uji hausman yaitu, jika Prob. Cross-section Random $< \alpha$ (0,05%) maka Fixed Effect Model yang dipilih, atau jika Prob.Cross-section Random $> \alpha$ (0,05) maka Random Effect Model yang dipilih.

Tabel 5.2.2.2 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	30.560475	4	0.0000

Sumber : Hasil olah data eviews 12.

Berdasarkan hasil uji Hausman, diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar $0.0000 < \alpha$ (5%). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model yang paling sesuai untuk digunakan adalah Fixed Effect Model.

5.2.3 Estimasi Model Fixed Effect Model

Berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa model Fixed Effect adalah model yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Hasil uji Chow menunjukkan bahwa Fixed Effect Model lebih sesuai dibandingkan dengan Common Effect Model, sementara uji Hausman juga mendukung pemilihan Fixed Effect Model dengan hasil yang signifikan pada probabilitas yang lebih kecil dari α (5%). Dengan demikian, penggunaan Fixed Effect Model dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan estimasi yang lebih akurat dan relevan untuk analisis variabel-variabel yang diteliti

Tabel 5.2.1 Estimasi Model Fixed Effect Model

Dependent Variable: TINGKATPENGANGGURAN
Method: Panel Least Squares
Date: 04/21/25 Time: 16:10
Sample: 2013 2023
Periods included: 11
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.745180	1.129538	5.971625	0.0000
PERTUMBUHANEKONOMI	-0.045916	0.032510	-1.412348	0.1640
TINGKATUPAH	-0.254679	0.072230	-3.525952	0.0009
INFLASI	-0.207620	0.053406	-3.887556	0.0003
TINGKATPENDIDIKAN	-0.024034	0.041332	-0.581492	0.5635

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.580234	Mean dependent var	2.041009
Adjusted R-squared	0.507231	S.D. dependent var	0.196549
S.E. of regression	0.137972	Akaike info criterion	-0.974944
Sum squared resid	0.875674	Schwarz criterion	-0.646472
Log likelihood	35.81097	Hannan-Quinn criter.	-0.847921
F-statistic	7.948095	Durbin-Watson stat	1.437773
Prob(F-statistic)	0.000001		

Sumber : Hasil olah data views 12

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan model Fixed Effect (Effect Specification: Cross-section fixed), diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

$$Y = 6.745180 - 0.045916 X_1 - 0.254679 X_2 - 0.207620 X_3 - 0.024034 X_4 +$$

Keterangan variabel:

- Y = Tingkat Pengangguran
- X1 = Pertumbuhan Ekonomi
- X2 = Tingkat Upah
- X3 = Inflasi
- X4 = Tingkat Pendidikan

5.2.4 Uji Asumsi Klasik

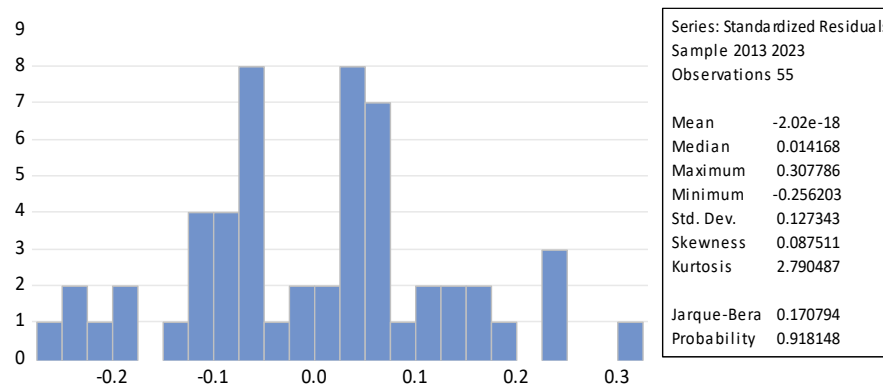
Uji asumsi klasik merupakan tahap penting dalam analisis regresi untuk memastikan bahwa model yang digunakan telah memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga hasil estimasi yang dihasilkan dapat dipercaya. Asumsi klasik terdiri dari

beberapa uji yang bertujuan untuk menguji validitas model regresi, antara lain uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas.

5.2.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji distribusi frekuensi dari data yang diamati apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal. Untuk menguji suatu data terdistribusi normal atau tidak dilakukan dengan uji statistik $JB\text{-}Square < Chi\text{-}Square\text{ table}$ maka data tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal begitupun sebaliknya (Gujarati, 2015 : 406).

Tabel 5.2.4.1 Hasil Uji Normalitas



Sumber : Hasil olah data views 12

Berdasarkan hasil olah data dapat dilihat bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 0,170794. Jika dibandingkan dengan nilai Chi-Square Tabel pada derajat kebebasan 2 dan tingkat signifikansi 5% yaitu 5,991, maka diperoleh bahwa nilai $JB < Chi\text{-}Square\text{ Tabel}$ ($0,170794 < 5,991$). Selain itu, nilai probabilitas sebesar 0,918148 yang lebih besar dari 0,05 juga menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal sehingga model dapat dilanjutkan ke tahap pengujian selanjutnya.

5.2.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang baik sebenarnya variabel independen tidak terjadi korelasi (Gujarati,2015) (gujarati N damodar, 2015) untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dilakukan uji korelasi antar variabel independen yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 5.2.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas

	PERTUMB...	TINGKATUPAH	INFLASI	TINGKATPE...
PERT...	1.000000	0.133001	-0.010895	-0.244998
TINGK...	0.133001	1.000000	-0.546784	0.106153
INFLASI	-0.010895	-0.546784	1.000000	-0.162125
TINGK...	-0.244998	0.106153	-0.162125	1.000000

Sumber : Hasil olah data eviews 12

Berdasarkan hasil olah data dapat dilihat bahwa nilai koefesien korelasi antar variabel lebih kecil dari 0,80. Dengan ketentuan *correlation matrix* < 0,8 maka di antara variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Upah, Inflasi dan tingkat pendidikan tidak terdapat multikolinearitas (Gujarati, 2015: 408) (Gujarati N. Damodar, 2015).

5.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi mengalami gangguan heteroskedastisitas atau tidak. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan metode regresi terhadap nilai absolut residual (ABS(RESID)).

Tabel 5.2.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.157577	Mean dependent var	0.131399
Adjusted R-squared	0.011069	S.D. dependent var	0.096974
S.E. of regression	0.096436	Akaike info criterion	-1.691291
Sum squared resid	0.427797	Schwarz criterion	-1.362818
Log likelihood	55.51050	Hannan-Quinn criter.	-1.564268
F-statistic	1.075553	Durbin-Watson stat	1.856426
Prob(F-statistic)	0.396692		

Sumber: Hasil olah data eviews 12

Berdasarkan hasil olahan, diperoleh nilai probabilitas (Prob. F-statistic) sebesar 0,396692, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara nilai residual dengan variabel independen, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami heteroskedastisitas.

5.2.5 Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis statistik merupakan pengujian terhadap hipotesis statistik yang akan menghasilkan suatu keputusan dalam menerima atau tidak menerima hipotesis statistik. Jika tidak menerima hipotesis nol atau H_0 maka penelitian yang dilakukan secara statistik keputusannya adalah berpengaruh dan jika tidak menolahkan hipotesis nol atau H_1 maka keputusan hasil penelitian tersebut secara statistik tidak berpengaruh.

5.2.5.1 Hasil Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang dibangun secara keseluruhan signifikan atau tidak dalam menjelaskan variasi dari variabel yang diteliti. Jika nilai probabilitas F lebih kecil dari tingkat signifikansi (misalnya 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dalam model. Hal ini penting untuk menguji kelayakan model sebelum menilai pengaruh masing-masing variabel secara parsial.

Tabel 5.2.5.1 Hasil Uji F

R-squared	0.580234
Adjusted R-squared	0.507231
S.E. of regression	0.137972
Sum squared resid	0.875674
Log likelihood	35.81097
F-statistic	7.948095
Prob(F-statistic)	0.000001

Sumber: Hasil olah data eviews 12

Berdasarkan hasil dari regresi fixed effect nilai Probabilitas F-statistic $0.000001 < 0.05$. Maka, secara simultan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Upah, Inflasi, dan Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran pada tingkat signifikansi 5%.

5.2.5.2 Hasil Uji t

Uji statistik parsial t digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah dalam model regresi.. Nilai signifikansi (p-value) yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (misalnya 0,05) menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh secara signifikan. Uji t juga membantu dalam mengevaluasi kekuatan hubungan setiap variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Dengan demikian, uji ini penting untuk mengetahui kontribusi individual dari setiap variabel dalam model.

Tabel 5.2.5.2 Hasil Uji t

Dependent Variable: TINGKATPENGANGGURAN
Method: Panel Least Squares
Date: 04/21/25 Time: 16:10
Sample: 2013 2023
Periods included: 11
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.745180	1.129538	5.971625	0.0000
PERTUMBUHANEKONOMI	-0.045916	0.032510	-1.412348	0.1640
TINGKATUPAH	-0.254679	0.072230	-3.525952	0.0009
INFLASI	-0.207620	0.053406	-3.887556	0.0003
TINGKATPENDIDIKAN	-0.024034	0.041332	-0.581492	0.5635

Sumber : Hasil olah data eviews 12

Kriteria uji:

- Jika Prob. < 0,05, maka tolak H_0 (signifikan)
- Jika Prob. $\geq$ 0,05, maka gagal tolak H_0 (tidak signifikan)

Variabel	Probabilitas	Keputusan	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi	0.1640	Gagal tolak H_0	Tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran
Tingkat Upah	0.0009	Tolak H_0	Berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran
Inflasi	0.0003	Tolak H_0	Berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran
Tingkat Pendidikan	0.5635	Gagal tolak H_0	Tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran

Berdasarkan hasil uji t yang ditampilkan pada Tabel 5.2.5.2, dapat dijelaskan bahwa:

1. Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai probabilitas sebesar 0,6918 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan demikian, perubahan pertumbuhan ekonomi belum mampu menunjukkan pengaruh nyata terhadap kondisi pengangguran di provinsi yang diteliti.
2. Tingkat Upah menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0009 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Artinya, perubahan tingkat upah terbukti memengaruhi jumlah pengangguran di provinsi yang diteliti.
3. Inflasi memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0003 nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Artinya, perubahan tingkat inflasi berhubungan erat dengan kondisi ketenagakerjaan di wilayah yang dianalisis.
4. Tingkat Pendidikan menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,5635 nilai ini lebih besar dari signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Artinya, perubahan tingkat pendidikan belum mampu menurunkan pengangguran di wilayah yang diteliti.

5.2.5.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen dalam model regresi. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa model semakin baik dalam menjelaskan variasi data. Dengan demikian, R^2 digunakan untuk menilai kualitas model regresi dan seberapa kuat hubungan antara variabel-variabel yang dianalisis.

Tabel 5.2.5.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.580234
Adjusted R-squared	0.507231
S.E. of regression	0.137972
Sum squared resid	0.875674
Log likelihood	35.81097
F-statistic	7.948095
Prob(F-statistic)	0.000001

Sumber : Hasil data olah eviews 12

Berdasarkan hasil dari regresi fixed effect nilai koefisien determinasi R-squared sebesar 0,5802 yang artinya variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat upah, inflasi, dan tingkat pendidikan menjelaskan variabel dependen yaitu pengangguran sebesar 58,02%. Sementara sisanya sebesar 41,98% dijelaskan oleh variabel lain.

5.3 Analisis Ekonomi

5.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi selama periode 2013–2023. Dengan kata lain, kenaikan pertumbuhan ekonomi belum tentu mampu menurunkan tingkat pengangguran di daerah tersebut.

Secara teori, pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran. Hal ini sesuai dengan pandangan Okun dalam teori Hukum Okun, yang menyatakan bahwa ketika PDRB meningkat, maka kegiatan produksi juga meningkat dan akan membuka lebih banyak lapangan kerja. (Mankiw, 2012) juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan adanya peningkatan permintaan barang dan jasa, sehingga perusahaan akan merekrut lebih banyak tenaga kerja.

Namun, dalam kenyataan di lima provinsi yang diteliti, pertumbuhan ekonomi belum cukup menurunkan pengangguran. Hal ini sejalan dengan fenomena yang terjadi di provinsi seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang meskipun mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun tingkat pengangguran di wilayah tersebut tetap tinggi. Salah satu penyebabnya adalah adanya mismatch antara kebutuhan tenaga kerja dengan ketersediaan SDM, serta

pertumbuhan jumlah pencari kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan penciptaan lapangan kerja.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alfinatus Suroya, 2022), yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat. Penelitian (Tamala et al., 2023) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak signifikan terhadap pengangguran di enam provinsi di Pulau Jawa. Oleh karena itu, untuk menurunkan tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi perlu diarahkan pada sektor-sektor yang lebih banyak menyerap tenaga kerja.

5.3.2 Pengaruh Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran

Tingkat upah berpengaruh signifikan secara negatif terhadap tingkat pengangguran di lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi selama periode 2013–2023. Artinya, semakin tinggi upah, maka tingkat pengangguran cenderung menurun.

Secara teori, kenaikan upah minimum dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong lebih banyak masyarakat untuk masuk ke dunia kerja. Namun, di sisi lain, apabila kenaikan upah tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas, perusahaan dapat mengurangi jumlah tenaga kerja untuk menghemat biaya. Dalam hasil penelitian ini, tingkat upah terbukti berpengaruh terhadap pengangguran, yang menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum yang diterapkan memiliki peran penting dalam menentukan penyerapan tenaga kerja di daerah.

Arthur Lewis dalam teorinya menjelaskan bahwa di negara berkembang, jumlah tenaga kerja yang melebihi kebutuhan industri formal menyebabkan banyak pekerja menerima upah yang rendah. Oleh karena itu, penetapan upah minimum oleh pemerintah menjadi bentuk intervensi yang diperlukan untuk melindungi pekerja dan meningkatkan pendapatan mereka secara layak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Faizah & Woyanti, 2023) yang menemukan bahwa tingkat upah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Penelitian (Prawira, 2018) juga menunjukkan

bahwa upah minimum memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan memiliki hubungan erat dengan kondisi ketenagakerjaan di berbagai daerah.

5.3.3 Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran

Inflasi berpengaruh signifikan secara negatif terhadap tingkat pengangguran di lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi selama periode 2013–2023. Artinya, ketika inflasi meningkat dalam jangka pendek, tingkat pengangguran cenderung menurun, ini bisa menunjukkan kondisi di mana inflasi mendorong aktivitas ekonomi.

Secara teori, hubungan antara inflasi dan pengangguran dapat dijelaskan melalui Kurva Phillips yang menyatakan bahwa ketika inflasi meningkat, pengangguran cenderung menurun karena perusahaan meningkatkan produksi dan memperluas tenaga kerja untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Namun, hubungan ini tidak selalu berlaku dalam jangka panjang, tergantung pada kondisi ekonomi masing-masing daerah.

Menurut (Hasibuan, 2023), inflasi yang terkendali dapat mendorong pertumbuhan usaha dan memperluas lapangan kerja, namun inflasi yang terlalu tinggi justru dapat menurunkan daya beli masyarakat dan membuat biaya produksi meningkat, sehingga berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Dalam konteks lima provinsi yang diteliti, hasil menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap pengangguran, yang kemungkinan besar terjadi karena inflasi dalam periode penelitian masih berada pada batas wajar dan mendorong kegiatan ekonomi.

Sebagai contoh, di Provinsi Jawa Barat, yang merupakan salah satu pusat industri manufaktur terbesar di Indonesia, inflasi yang berada pada tingkat yang wajar dan dalam jangka pendek justru mendorong pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah. Ketika inflasi naik dalam batas yang masih bisa dikendalikan, permintaan terhadap barang-barang produksi meningkat. Hal ini membuat banyak perusahaan memperluas produksinya dan merekrut lebih banyak tenaga kerja, khususnya di sektor tekstil, makanan dan minuman, serta industri rumahan. Hal ini

sejalan dengan hasil penelitian bahwa inflasi berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran di wilayah tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Tamala et al., 2023) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian (Hasan & Sasana, 2020) juga menemukan bahwa inflasi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran muda di kawasan ASEAN. Hasil-hasil tersebut memperkuat temuan dalam penelitian ini bahwa inflasi merupakan salah satu variabel penting yang memengaruhi kondisi ketenagakerjaan.

5.3.4 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran

Tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi selama periode 2013–2023. Artinya, tingkat pendidikan belum terbukti signifikan dalam menurunkan pengangguran secara statistik di wilayah dan periode yang diteliti.

Secara teori, pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperbesar peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Menurut (Suhendra dan Wicaksono, 2020), semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar kemungkinan ia memperoleh pekerjaan yang layak dan berpenghasilan lebih baik. Pendidikan juga dapat meningkatkan produktivitas, kemampuan beradaptasi, serta kesiapan individu dalam menghadapi persaingan kerja.

Namun, di beberapa provinsi seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, meskipun tingkat pendidikannya sudah relatif tinggi, angka penganggurannya tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya pendidikan belum tentu langsung menjamin seseorang mendapatkan pekerjaan. Salah satu penyebabnya bisa jadi karena ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, atau terbatasnya lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Faizah dan Woyanti, 2023) yang menunjukkan bahwa pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Banten. Penelitian (Putra dan Hidayah, 2023) juga menyimpulkan bahwa pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Hal ini memperkuat temuan dalam penelitian ini bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah saja belum cukup untuk menurunkan pengangguran secara signifikan tanpa didukung oleh peningkatan keterampilan dan relevansi kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri.

5.4 Implikasi Kebijakan

5.4 Pertumbuhan Ekonomi

Hasil estimasi regresi data panel menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di lima provinsi yang diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan tidak selalu disertai dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat terjadi karena pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh sektor-sektor yang bersifat padat modal dan berteknologi tinggi, seperti industri ekstraktif dan manufaktur besar, yang tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Selain itu, adanya mismatch antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri juga menjadi faktor yang menyebabkan pengangguran tetap tinggi meskipun PDRB meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Sari & Wibowo, 2020) yang menemukan bahwa PDRB tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di beberapa wilayah di Indonesia. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu berdampak langsung terhadap penurunan pengangguran apabila distribusi manfaat ekonomi tidak merata dan tidak menyentuh sektor tenaga kerja secara luas.

Berdasarkan temuan ini, penulis menyarankan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan PDRB sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas dan mampu menciptakan lapangan kerja. Pemerintah daerah perlu mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja, seperti sektor perdagangan, jasa, dan industri kecil. Selain itu, pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha juga perlu ditingkatkan, agar tenaga kerja lokal memiliki keterampilan yang relevan dan lebih mudah terserap di pasar kerja.

5.4.2 Tingkat Upah

Berdasarkan hasil penelitian ini, tingkat upah berpengaruh signifikan secara negatif terhadap tingkat pengangguran di lima provinsi yang diteliti, Arah koefisien yang negatif berarti bahwa semakin tinggi upah minimum, maka tingkat pengangguran cenderung menurun.

Pengaruh negatif ini bisa terjadi karena kenaikan upah minimum dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Ketika daya beli meningkat, permintaan terhadap barang dan jasa juga ikut naik. Hal ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksinya dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Selain itu, upah yang lebih tinggi juga bisa mendorong pekerja informal untuk beralih ke sektor formal yang lebih stabil, sehingga angka pengangguran terbuka menurun.

Hasil penelitian ini sejalan didukung oleh penelitian yang di lakukan (Riyanto, 2020) yang menemukan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Indonesia. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa upah minimum yang terus meningkat, bila diiringi dengan pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah, dapat membuka peluang kerja yang lebih luas dan menurunkan jumlah pengangguran.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar pemerintah tidak hanya menetapkan upah minimum setiap tahun, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut bisa mendorong terciptanya lapangan kerja. Pemerintah daerah dapat mendukung pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong sektor-sektor usaha yang menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan upah minimum juga perlu diperkuat agar kebijakan ini bisa berdampak langsung terhadap penurunan pengangguran.

5.4.3 Inflasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Artinya, ketika inflasi meningkat, angka pengangguran cenderung ikut naik. Hal ini dapat terjadi karena inflasi yang tinggi menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya produksi, sehingga perusahaan terpaksa mengurangi jumlah pekerja untuk menekan biaya operasional.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pertiwi dan Sari, 2021), yang menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap pengangguran di beberapa provinsi di Indonesia. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa inflasi yang tidak terkendali dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan menghambat penciptaan lapangan kerja, terutama pada sektor usaha kecil dan menengah yang lebih rentan terhadap kenaikan harga bahan baku dan barang konsumsi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan pemerintah perlu menjaga stabilitas harga agar inflasi tetap terkendali, terutama pada barang kebutuhan pokok dan biaya produksi. Pengendalian inflasi dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, seperti pengawasan terhadap harga pangan, penguatan cadangan barang, serta pengaturan suku bunga dan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pemerintah daerah juga disarankan menjalin kerja sama dengan pelaku usaha dan pelaku distribusi untuk memastikan ketersediaan barang serta memperlancar rantai pasok. Dengan inflasi yang stabil, iklim usaha akan lebih kondusif dan dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru, sehingga angka pengangguran dapat ditekan.

5.4.5 Tingkat Pendidikan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran. Artinya, peningkatan rata-rata lama sekolah atau jenjang pendidikan belum mampu secara langsung menurunkan angka pengangguran di wilayah yang diteliti selama periode 2013–2023. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja (mismatch), kualitas pendidikan yang belum merata, atau terbatasnya lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh (Hidayat & Fitriani, 2021), yang menemukan bahwa pendidikan belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan pengangguran di beberapa provinsi karena adanya kesenjangan antara output pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Dalam kondisi ini, peningkatan

jenjang pendidikan saja tidak cukup untuk menjamin terserapnya lulusan ke dunia kerja.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan pemerintah untuk tidak hanya fokus pada peningkatan angka jumlah penduduk yang bersekolah, tetapi juga pada perbaikan kualitas dan relevansi pendidikan. Penguatan pendidikan vokasional, program magang industri, serta kerja sama antara lembaga pendidikan dan dunia usaha sangat diperlukan untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran. Artinya, meskipun terjadi peningkatan dalam rata-rata lama sekolah atau jenjang pendidikan, hal tersebut belum mampu menurunkan angka pengangguran secara langsung di lima provinsi yang diteliti selama periode 2013–2023. Salah satu penyebabnya bisa jadi karena adanya ketidaksesuaian antara keahlian yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, atau karena kualitas pendidikan yang belum merata di berbagai daerah.

Temuan ini didukung oleh penelitian (Hidayat & Fitriani, 2021) yang menjelaskan bahwa pendidikan belum mampu memberikan pengaruh nyata terhadap penurunan pengangguran karena banyak lulusan belum siap masuk ke dunia kerja, baik dari segi keterampilan maupun pengalaman.

Berdasarkan hasil ini, penulis menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah penduduk yang bersekolah, tetapi juga memperhatikan kualitas dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan dunia kerja. Pemerintah dapat memperkuat pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Kerja sama antara sekolah atau perguruan tinggi dengan dunia usaha juga penting dilakukan agar lulusan memiliki bekal keterampilan yang dibutuhkan. Selain itu, pengembangan pusat pelatihan kerja dan program reskilling/upskilling bagi angkatan kerja juga penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja di era transformasi digital dan industri 4.0.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini yang mencakup analisis deskriptif serta pengujian menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Berdasarkan analisis deskriptif selama periode 2013–2023, lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia menunjukkan tren peningkatan pada variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB), upah minimum provinsi (UMP), dan tingkat pendidikan, sedangkan inflasi cenderung fluktuatif namun relatif terkendali. Meski demikian, tingginya angka pengangguran di provinsi-provinsi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan indikator ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan pengangguran secara langsung.
2. Berdasarkan hasil analisis regresi, ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, tingkat upah, inflasi, dan tingkat pendidikan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran di lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia.
3. Berdasarkan hasil analisis regresi panel, ditemukan bahwa variabel tingkat upah minimum dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di lima provinsi yang diteliti. Sementara itu, variabel pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.
4. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat upah minimum, inflasi, dan tingkat pendidikan secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel tingkat pengangguran sebesar 58,02%, sedangkan sisanya sebesar 41,98% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, maka penulis mempunyai beberapa saran yang diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan praktis, adapun beberapa saran yang ingin disampaikan penulis, sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga inklusif dan mampu menciptakan lapangan kerja, khususnya di sektor-sektor padat karya. Strategi pembangunan harus diarahkan untuk menjangkau masyarakat usia produktif yang rentan menganggur.
2. Kebijakan upah minimum perlu disusun dengan memperhatikan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha. Selain itu, peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja harus menjadi prioritas agar upah yang lebih tinggi tidak menyebabkan pengurangan tenaga kerja.
3. Pemerintah harus menjaga inflasi dalam batas wajar agar tidak mengurangi daya beli masyarakat. Inflasi yang terkendali dapat menjadi pendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor usaha kecil dan menengah.
4. Peningkatan rata-rata lama sekolah perlu dibarengi dengan perbaikan kualitas dan relevansi pendidikan. Pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri harus diperluas untuk mengurangi mismatch antara lulusan pendidikan dan dunia kerja.
5. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan variabel tambahan seperti jumlah angkatan kerja, indeks pembangunan manusia (IPM), atau migrasi untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan mencerminkan kompleksitas masalah pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfinatus Suroya, R. E. (2022). Pengaruh PDRB, IPM, Jumlah Angkatan Kerja dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022. 6, 192–206. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v6i1.793>
- Amrullah, W. A., Istiyani, N., & Muslihatinningsih, F. (2019). Analisis Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa Tahun 2007-2016. E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, 6(1), 43. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v6i1.11074>
- Baah-Boateng, W. (2013). Determinants of Unemployment in Ghana. African Development Review, 25(4), 385–399. <https://doi.org/10.1111/1467-8268.12037>
- Baltagi, B. H. (2008). Econometric analysis of panel data. John Wiley & Sons.
- Baltagi, B. H. (2021). Econometric Analysis of Panel Data. Springer.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS. Rajawali Pers.
- Buswari, M., Puspaningtyas, M., Priyanto, E., Drajat, M., Ulfa, N., & Larasati, V. (2023). Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pengangguran , Kemiskinan , dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia : Sebuah Studi Empiris dengan Pendekatan Regresi. 1(2), 29–38.
- Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2005). Microeconometrics: Methods and Applications. Cambridge University Press.
- Diakhoumpa, M. (2020). Effect Of Economic Growth And Inflation On Unemployment: An empirical Analysis In Senegal From 1991 To 2018. Journal of Economics Library, 7(1), 19–38. www.kspjournals.org
- Dian. (2023). Pengaruh Inflasi Terhadap Pengangguran Di Indonesia. Jurnal Pijar, 1(2), 83–88. <https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/pmb>
- Egeten, M. G., Kawung, G. M. ., & D.Tolosang, K. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Jumlah Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota-Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 23(3), 25–36.

- <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/46512%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/download/46512/41659>
- Faizah, U. N., & Woyanti, N. (2023). Analisis Pengaruh Pendidikan, Partisipasi Kerja, Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Provinsi Banten Tahun 2011-2020. *BISECER (Business Economic Entrepreneurship)*, 6(1), 48. <https://doi.org/10.61689/bisecer.v6i1.386>
- Greene, W. H. (2012). *Econometric Analysis* (7th ed). Pearson.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed). McGraw.
- Hartati, N. (2020). Pengaruh Inflasi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2010 – 2016. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 5(01), 92–119. <https://doi.org/10.37366/jespb.v5i01.86>
- Hasan, Z., & Sasana, H. (2020). Determinants of youth unemployment rate in Asean. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3), 6687–6691.
- Hsiao, C. (2014). *Analysis of Panel Data* (3rd ed). Cambridge University Press.
- Iswahyudi Joko Suprayitno, Moh.Yamin Darsyah, U. S. R. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Jumlah Pengangguraan Di Kota Semarang. 14, 63–65. <https://doi.org/10.15900/j.cnki.zylf1995.2018.02.001>
- Judijanto, L., & Sudi, D. M. (2023). Analysis of Economic, Education, and Skill Factors against High Unemployment: A Case Study in West Java Province. *West Science Journal Economic and Entrepreneurship*, 1(03), 100–108. <https://doi.org/10.58812/wsjee.v1i03.405>
- Julianto,Dedi,. & Utari, P. A. (2019). Analisa Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pendapatan Individu. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Manaa, A., & Muhammad Abrar, ul H. (2020). The Effects of SMEs, Population and Education level on Unemployment in Kingdom of Bahrain. *IKSP Journal of Business and Economics*, 1(2), 23–33. <http://iksp.org/journals/index.php/ijbe/index>
- Mankiw, N. G. (2000). *Teori Makro Ekonomi*. Erlangga.
- Mankiw, N. G. (2012). *Makroekonomi (Keenam) (Keenam)*. Erlangga.

- Maryati, S., Handra, H., & Muslim, I. (2021). Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Menuju Era Bonus Demografi di Sumatra Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(1), 95–107. <https://doi.org/10.21002/jepi.2021.07>
- Novella Luckytha Putri, & Muljaningsih, S. (2023). Analisis Pengaruh Inflasi, Upah Minimum, Dan Angka Harapan Hidup Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2008-2020. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(3), 463–474. <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.3.01>
- Pokhrel, S. (2024). No TitleEΛENH. *Αγαη*, 15(1), 37–48.
- Prawira, S. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran Terbuka Di Indonesia. 1, 162–168.
- Putra, G. V. H., & Hidayah, N. (2023). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2021. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(1), 149–158. <https://doi.org/10.15575/jim.v4i1.23731>
- Qomariyah, I. (2013). Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3), 1–8.
- Suaidah, I., & Cahyono, H. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 3(1), 93–94. [file:///C:/Users/admin/Downloads/Artikel+Murbanto+rev\(1\).pdf](file:///C:/Users/admin/Downloads/Artikel+Murbanto+rev(1).pdf)
- Tamala1, N., Inaya2, I., Aulia3, M. N., Nurtias4, S., & Desmawan5, D. (2023). Analisis Pengaruh Pdrb, Tenaga Kerja, Ump, Dan Ipm Terhadap Pengangguran Di 6 Provinsi Pulau Jawa Tahun 2010-2019. *BISE CER (Business Economic Entrepreneurship)*, 6(2), 46. <https://doi.org/10.61689/bisecer.v6i2.393>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Regresi

Provinsi	Tahun	Tingkat Pengangguran (%)	Pertumbuhan Ekonomi (Milyar Rupiah)	Tingkat Upah (Juta Rupiah)	Inflasi (%)	Tingkat Pendidikan (Tahun)
DKI Jakarta	2013	8.63	1296695	2200000	8	10.47
DKI Jakarta	2014	8.47	1373389	2441000	2.46	10.54
DKI Jakarta	2015	7.23	1454564	2700000	3.3	10.7
DKI Jakarta	2016	6.12	1539917	3100000	2.37	10.88
DKI Jakarta	2017	7.14	1635359	3355750	3.72	11.02
DKI Jakarta	2018	6.65	1735208	3648036	3.27	11.05
DKI Jakarta	2019	6.54	1836241	3940973	3.23	11.06
DKI Jakarta	2020	10.95	1792291	4276350	1.59	11.13
DKI Jakarta	2021	8.5	1856001	4416186	1.53	11.17
DKI Jakarta	2022	7.18	1953489	4641854	4.21	11.31
DKI Jakarta	2023	6.53	2050466	4901798	2.08	11.45
Banten	2013	9.54	3310991	1170000	9.65	8.17
Banten	2014	9.07	3493512	1325000	10.2	8.19
Banten	2015	9.55	3683772	1600000	4.29	8.27
Banten	2016	8.92	3878351	1784000	2.94	8.37
Banten	2017	9.28	410137	1931180	3.98	8.53
Banten	2018	8.47	4337827	2099385	3.42	8.62
Banten	2019	8.11	456620	2267990	3.3	8.74
Banten	2020	10.64	4411486	2460997	1.45	8.89
Banten	2021	8.98	4609528	2460996	1.91	8.93
Banten	2022	8.09	4841312	2501203	5.08	0.13
Banten	2023	7.53	5074272	2661280	2.04	9.15
Kep.Riau	2013	5.63	1372639	1365087	8.24	9.63
Kep.Riau	2014	6.69	1463252	1665000	7.59	9.64
Kep.Riau	2015	6.2	1551314	1954000	4.4	9.65

Kep.Riau	2016	7.69	162853	2178710	3.53	9.67
Kep.Riau	2017	7.69	1660817	2358454	4.02	9.79
Kep.Riau	2018	8.04	1734988	2563875	3.47	9.81
Kep.Riau	2019	7.5	1818777	2769754	2.03	9.99
Kep.Riau	2020	10.34	1749592	3005460	1.18	10.12
Kep.Riau	2021	9.91	1809524	3005460	2.26	10.18
Kep.Riau	2022	8.23	1901637	3050172	5.83	10.37
Kep.Riau	2023	6.8	2000439	3279194	2.76	10.41
Jawa Barat	2013	9.16	1093544	850000	9.15	7.58
Jawa Barat	2014	8.45	1149216	1000000	7.6	7.71
Jawa Barat	2015	8.72	1207232	1000000	2.73	7.86
Jawa Barat	2016	8.89	1275619	2250000	2.75	7.95
Jawa Barat	2017	8.82	1343662	1420624	3.63	8.14
Jawa Barat	2018	8.23	1419624	1544361	3.54	8.15
Jawa Barat	2019	8.04	1490960	1668373	3.21	8.37
Jawa Barat	2020	10.46	1453381	1810351	2.18	8.55
Jawa Barat	2021	9.82	1507746	1810351	1.69	8.93
Jawa Barat	2022	8.31	1589985	1841487	6.04	9.13
Jawa Barat	2023	7.44	1669417	1986670	2.48	9.15
Papua Barat	2013	4.62	4769423	1720000	6.72	6.91
Papua Barat	2014	5.02	5025991	1870000	8.36	6.96
Papua Barat	2015	8.08	5234649	2015000	3.35	7.01
Papua Barat	2016	7.46	5471128	2237000	3.02	7.06
Papua Barat	2017	6.49	5690796	2416855	3.61	7.15
Papua Barat	2018	6.45	6046552	2667000	3.13	7.27
Papua Barat	2019	6.43	6207452	2934500	2.72	7.44
Papua Barat	2020	6.8	6160413	3134600	1.68	7.6
Papua Barat	2021	5.84	612894	3134600	2.06	7.69
Papua Barat	2022	5.37	6251853	3200000	4.4	7.84
Papua Barat	2023	5.53	4095486	3282000	4.4	7.93

Lampiran 2. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.640119	(4,46)	0.0001
Cross-section Chi-square	28.019175	4	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: TINGKATPENGANGGURAN

Method: Panel Least Squares

Date: 04/21/25 Time: 23:50

Sample: 2013 2023

Periods included: 11

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.338747	1.273956	5.760599	0.0000
PERTUMBUHANEKONOMI	0.057372	0.092119	0.622804	0.5363
TINGKATUPAH	-7.06E-07	2.79E-07	-2.531979	0.0146
INFLASI	-0.039440	0.116833	-0.337573	0.7371
TINGKATPENDIDIKAN	0.192500	0.131413	1.464847	0.1493
R-squared	0.148512	Mean dependent var		7.400926
Adjusted R-squared	0.079003	S.D. dependent var		1.572554
S.E. of regression	1.509158	Akaike info criterion		3.749002
Sum squared resid	111.6003	Schwarz criterion		3.933167
Log likelihood	-96.22305	Hannan-Quinn criter.		3.820027
F-statistic	2.136585	Durbin-Watson stat		0.938180
Prob(F-statistic)	0.090314			

Lampiran 3. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	30.560475	4	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PERTUMBUHANEKONOMI	0.012955	-0.045916	0.000365	0.0020
TINGKATUPAH	-0.148724	-0.254679	0.006219	0.1791
INFLASI	-0.159441	-0.207620	0.000710	0.0706
TINGKATPENDIDIKAN	0.001080	-0.024034	0.000164	0.0495

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: TINGKATPENGANGGURAN

Method: Panel Least Squares

Date: 04/21/25 Time: 23:52

Sample: 2013 2023

Periods included: 11

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.745180	1.129538	5.971625	0.0000
PERTUMBUHANEKONOMI	-0.045916	0.032510	-1.412348	0.1640
TINGKATUPAH	-0.254679	0.072230	-3.525952	0.0009
INFLASI	-0.207620	0.053406	-3.887556	0.0003
TINGKATPENDIDIKAN	-0.024034	0.041332	-0.581492	0.5635

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.580234	Mean dependent var	2.041009
Adjusted R-squared	0.507231	S.D. dependent var	0.196549
S.E. of regression	0.137972	Akaike info criterion	-0.974944
Sum squared resid	0.875674	Schwarz criterion	-0.646472
Log likelihood	35.81097	Hannan-Quinn criter.	-0.847921
F-statistic	7.948095	Durbin-Watson stat	1.437773
Prob(F-statistic)	0.000001		

Lampiran 4. Hasil Uji LM (Langrange Multiplier)

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	19.86704 (0.0000)	0.356056 (0.5507)	20.22310 (0.0000)
Honda	4.457246 (0.0000)	-0.596704 (0.7246)	2.729816 (0.0032)
King-Wu	4.457246 (0.0000)	-0.596704 (0.7246)	3.448109 (0.0003)
Standardized Honda	6.688083 (0.0000)	-0.266247 (0.6050)	0.456015 (0.3242)
Standardized King-Wu	6.688083 (0.0000)	-0.266247 (0.6050)	1.713949 (0.0433)
Gourieroux, et al.	--	--	19.86704 (0.0000)

Lampiran 5. Hasil Uji t

Dependent Variable: TINGKATPENGANGGURAN

Method: Panel Least Squares

Date: 04/21/25 Time: 16:10

Sample: 2013 2023

Periods included: 11

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.745180	1.129538	5.971625	0.0000
PERTUMBUHANEKONOMI	-0.045916	0.032510	-1.412348	0.1640
TINGKATUPAH	-0.254679	0.072230	-3.525952	0.0009
INFLASI	-0.207620	0.053406	-3.887556	0.0003
TINGKATPENDIDIKAN	-0.024034	0.041332	-0.581492	0.5635

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.580234	Mean dependent var	2.041009
Adjusted R-squared	0.507231	S.D. dependent var	0.196549
S.E. of regression	0.137972	Akaike info criterion	-0.974944
Sum squared resid	0.875674	Schwarz criterion	-0.646472
Log likelihood	35.81097	Hannan-Quinn criter.	-0.847921
F-statistic	7.948095	Durbin-Watson stat	1.437773
Prob(F-statistic)	0.000001		

Lampiran 6. Hasil Uji F

Dependent Variable: TINGKATPENGANGGURAN

Method: Panel Least Squares

Date: 04/21/25 Time: 16:10

Sample: 2013 2023

Periods included: 11

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.745180	1.129538	5.971625	0.0000
PERTUMBUHANEKONOMI	-0.045916	0.032510	-1.412348	0.1640
TINGKATUPAH	-0.254679	0.072230	-3.525952	0.0009
INFLASI	-0.207620	0.053406	-3.887556	0.0003
TINGKATPENDIDIKAN	-0.024034	0.041332	-0.581492	0.5635

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.580234	Mean dependent var	2.041009
Adjusted R-squared	0.507231	S.D. dependent var	0.196549
S.E. of regression	0.137972	Akaike info criterion	-0.974944
Sum squared resid	0.875674	Schwarz criterion	-0.646472
Log likelihood	35.81097	Hannan-Quinn criter.	-0.847921
F-statistic	7.948095	Durbin-Watson stat	1.437773
Prob(F-statistic)	0.000001		

Lampiran 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dependent Variable: TINGKATPENGANGGURAN

Method: Panel Least Squares

Date: 04/21/25 Time: 16:10

Sample: 2013 2023

Periods included: 11

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.745180	1.129538	5.971625	0.0000
PERTUMBUHANEKONOMI	-0.045916	0.032510	-1.412348	0.1640
TINGKATUPAH	-0.254679	0.072230	-3.525952	0.0009
INFLASI	-0.207620	0.053406	-3.887556	0.0003
TINGKATPENDIDIKAN	-0.024034	0.041332	-0.581492	0.5635

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.580234	Mean dependent var	2.041009
Adjusted R-squared	0.507231	S.D. dependent var	0.196549
S.E. of regression	0.137972	Akaike info criterion	-0.974944
Sum squared resid	0.875674	Schwarz criterion	-0.646472
Log likelihood	35.81097	Hannan-Quinn criter.	-0.847921
F-statistic	7.948095	Durbin-Watson stat	1.437773
Prob(F-statistic)	0.000001		